



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN PERKEMBANGAN EKONOMI DAN FISKAL DAERAH

Assessment Kinerja
Perekonomian dan
Layanan Publik di
Wilayah Bali dan Nusa
Tenggara

Edisi Oktober 2023

2023

Executive Summary

- Kondisi makroekonomi Bali dan Nusa Tenggara masih relative lebih stabil walaupun sedikit terjadi perlambatan pada pertumbuhan ekonomi. Di Bali, melambatnya pertumbuhan disebabkan adanya penurunan produksi pertanian dan perikanan akibat perubahan iklim sehingga mempengaruhi sektor makanan minuman dan pariwisata. Sedangkan menurunnya aktivitas pertambangan penggalan akibat larangan ekspor konsentrat tembaga membuat pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat cenderung negatif. Di sisi lain, NTT mengalami pertumbuhan positif dikarenakan adanya kebijakan food estate yang meningkatkan produksi pertanian.
- Perlambatan pertumbuhan ekonomi dapat dikompensasi oleh perbaikan pada kemiskinan, pengangguran serta rasio gini. Hal ini disebabkan adanya konsistensi kebijakan bantuan sosial pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Lebih lanjut lagi, kinerja sektor kesehatan juga semakin baik karena adanya perhatian pemerintah untuk menanggulangi angka stunting di Indonesia. Bali memiliki angka stunting paling rendah diantara semua provinsi di Indonesia.
- Perkembangan makroekonomi yang baik dapat meningkatkan dukungan terhadap sektor-sektor ekonomi yang akan dikembangkan. Hasil analisis Overlay menunjukkan, untuk wilayah di NTT sektor utama yang perlu dikembangkan adalah jasa keuangan dan asuransi, selain dari sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Sedangkan di wilayah NTB sektor Pendidikan perlu lebih dioptimalkan. Di wilayah Bali, sektor kesehatan dan pendidikan dan real estate juga dapat menjadi prioritas pertama.
- Perkembangan ekonomi sektoral tidak terlepas dari dukungan pemerintah baik melalui APBD maupun TKD. Pada kinerja pengelolaan TKD, terdapat beberapa jenis peningkatan TKD yang perlu diperhatikan. Transfer ke daerah lebih banyak meningkat pada penerimaan DBH karena harga komoditas yang tinggi memberikan peningkatan pendapatan pada NTB dan NTT yang memiliki sumber daya pertambangan dan penggalan. Sedangkan di wilayah Bali, penyaluran DAK Non Fisik meningkat dikarenakan adanya dukungan terhadap pariwisata. Di sisi lain, DAU, insentif fiskal, DAK Fisik dan dana desa mengalami penurunan karena syarat salurnya masih berproses.
- Seiring dengan pertumbuhan ekonominya, pada kinerja APBD khususnya di sisi pendapatan, daerah Bali Nusa Tenggara mengalami peningkatan di sisi pajak yang berasal dari aktivitas konsumsi yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir. Sedangkan di sisi belanja, belanja kesehatan juga belanja pegawai mengalami peningkatan. Belanja lainnya seperti belanja hibah Badan, Lembaga, Bantuan Keuangan juga mengalami peningkatan untuk mengurangi ketimpangan vertikal di kabupaten/kota.
- Kondisi dukungan APBD dan TKD yang dapat menstimulus sektor yang unggul dan kompetitif akan mempercepat proses reformasi struktural di daerah. Reformasi struktural di Bali Nusa Tenggara tergolong cukup berimbang dimana faktor positif pendukung reformasi itu sama banyaknya dengan faktor negatifnya. Kondisi lapangan pekerjaan serta infrastruktur yang sedang dibangun menunjukkan angka positif pendukung reformasi sedangkan kualitas SDM dari sisi IPM serta pelayanan birokrasi atau administrasi pemerintahan masih menunjukkan perlu perbaikan.

Executive Summary

- Peningkatan kualitas SDM baik terampil maupun tidak terampil dapat menjadi kunci adanya percepatan pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pelayanan administrasi satu atap juga dapat memperbesar kemungkinan percepatan investasi yang akan berguna bagi pembangunan berkelanjutan dalam kerangka reformasi struktural.
- Keunggulan utama pada reformasi struktural di Bali dan Nusa Tenggara adalah kondisi infrastrukturnya. Kondisi infrastruktur yang baik terlihat paling bagus di wilayah Bali dan paling rendah di NTT dengan indeks infrastruktur yang sangat baik. Hal inilah yang menjadi strategi utama Bali dalam menarik wisatawan masuk baik lokal maupun internasional.
- Namun, terdapat faktor eksternal seperti el nino yang mengakibatkan beberapa perlambatan yaitu produksi pertanian dan perikanan. Di dalam laporan LPEFD terdapat kajian khusus dengan metode CGE yang menyimpulkan bahwa Pemerintah perlu memitigasi dampak elnino ini dalam dukungan anggaran di APBD khususnya pada alternatif solusi pertanian ketika terjadi gagal panen. Misalnya, Pemerintah perlu memberoikan bantuan modal dan asuransi pertanian pada petani yang dapat meng-cover loss akibat dampak El Nino. Selain itu kebijakan pemberian kredit lunak kepada petani juga dapat menjadi pertimbangan untuk meredam potensi loss para buruh tani yang disebabkan adanya gangguan gagal panen sebagai akibat adanya kekeringan ekstrim akibat El Nino.
- Besaran anggaran yang dapat diusulkan pemerintah daerah dapat dikalibrasi menggunakan pendekatan CGE yang melihat sejauh mana el nino ini dapat menurunkan konsumsi atau menurunkan pendapatan masyarakat. Dengan dasar kajian ini, pemerintah daerah dalam hal ini pihak eksekutif memiliki baseline atau acuan yang dapat digunakan sebagai argumen kepada parlemen untuk meng-earmark tambahan anggaran belanja bantuan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan tersebut. Selanjutnya bagi pemerintah pusat, DAK Ketahanan Pangan dapat dialokasikan utamanya untuk lokasi-lokasi prioritas yang sering terdampak el nino dengan tingkat resiliensi iklimnya yang rendah. Penentuan lokasi prioritas ini perlu menjadi perhatian agar efektivitas dari DAK Ketahanan pangan terhadap potensi gangguan El Nino ini dapat termitigasi dengan baik.
- Kajian khusus ini memberikan inspirasi bahwa inovasi daerah sangat penting bagi keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, inovasi daerah di Bali berupa pengelolaan sampah dapat menjadi hal yang menarik dalam meningkatkan pendapatan karena dapat meningkatkan pasokan untuk kesuburan lahan akibat pengelolaan sampah yang akan berpengaruh pada lahan hijau untuk iklim yang lebih baik. Selain itu, sanitasi dapat lebih terjaga karena pengelolaan sampah yang benar akan mengarahkan masyarakat untuk hidup lebih sehat dengan infrastruktur yang terjaga kebersihannya.

DAFTAR ISI



<i>Executive Summary</i>	02
Daftar Isi	04
Kinerja Makroekonomi Regional	06
Kinerja Ekonomi Spasial dan Sektoral Daerah	10
Kinerja Transfer ke Daerah	14

DAFTAR ISI



Kinerja Fiskal Daerah	18
Perekembangan Reformasi Struktural Indonesia	23
Kinerja Pelayanan Publik	28
Kajian Khusus	35
Inovasi Daerah	42

KINERJA MAKROEKONOMI REGIONAL

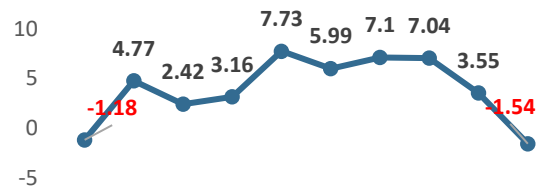


Pertumbuhan Ekonomi

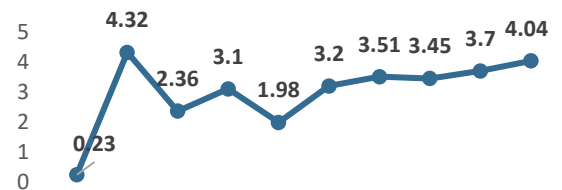
Pertumbuhan ekonomi di regional Bali dan Nusa Tenggara pada tahun 2022 tumbuh rata-rata sebesar 2,7% lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu rata-rata sebesar 4,9%. Aktivitas ekonomi di Provinsi Bali triwulan 2 pada tahun 2023 memiliki pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6% meningkat 2 kali lipat lebih dibandingkan triwulan yang sama pada tahun 2022 tumbuh sebesar 3,09% dan merupakan provinsi yang tumbuh paling tinggi di antara provinsi lainnya. Sementara itu, Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan provinsi dengan pertumbuhan paling rendah yaitu negatif 1,54%. Pertumbuhan tersebut terjadi di tengah kondisi perekonomian global mengalami penguatan pasca pandemi serta kenaikan harga komoditas di pasar global, yang juga berimbas pada ekonomi Indonesia terutama di regional Bali dan Nusa Tenggara.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 target pertumbuhan ekonomi ditetapkan 5,3% - 5,9% sehingga untuk mencapai target tersebut perlu usaha dan kerja keras dari semua pihak tidak hanya tingkat nasional namun juga kolaborasi yang baik dan harmonis antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan.

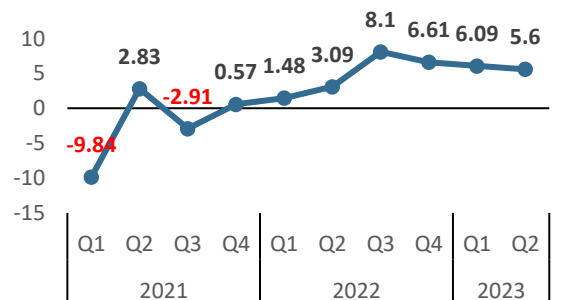
NTB



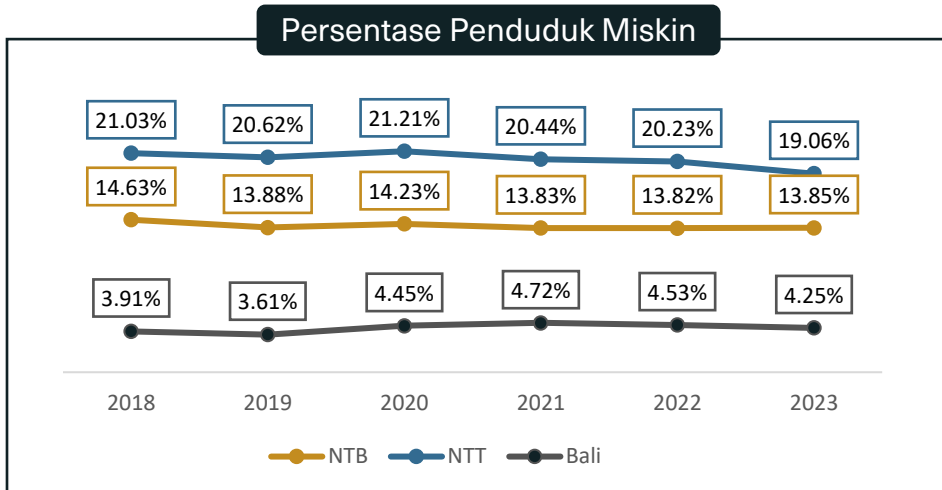
NTT



BALI



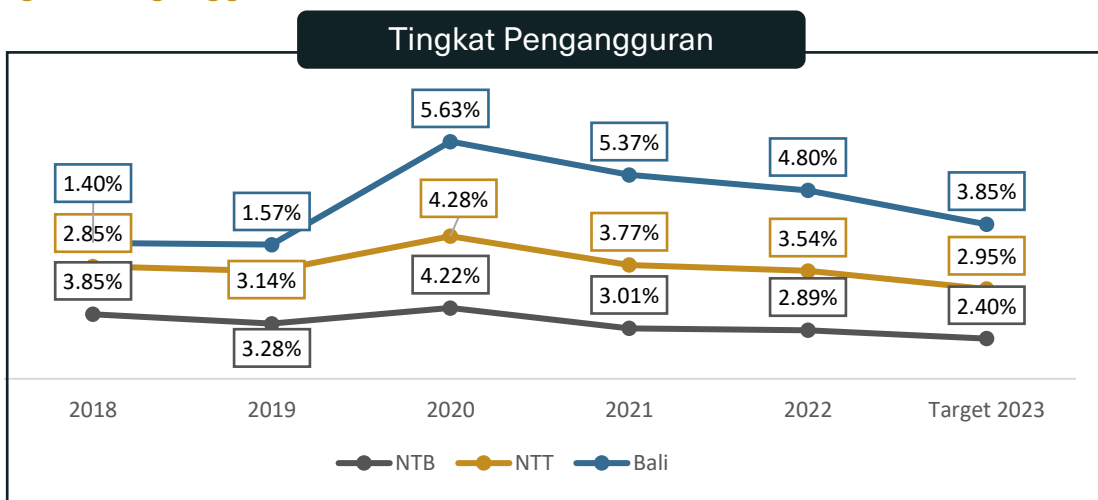
Tingkat Kemiskinan



Tingkat kemiskinan semakin menurun, sejalan dengan kualitas pertumbuhan ekonomi dimana manfaat pembangunan semakin dirasakan masyarakat. Tingkat kemiskinan menurun di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, dari rata-rata sebesar 13% di tahun 2021, turun menjadi rata-rata sebesar 12,39% di tahun 2023.

Secara spasial, persentase penduduk miskin tertinggi berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 19,06% sedangkan persentase penduduk miskin terendah berada di Provinsi Bali sebesar 4,25%. sementara itu peningkatan penduduk miskin terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, jika pada tahun 2022 penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 13,82% meningkat 0,2% pada tahun 2023 menjadi sebesar 13,85%. Selanjutnya penurunan persentase penduduk miskin tertinggi berada di provinsi Bali turun sebesar 6,18%.

Tingkat Pengangguran

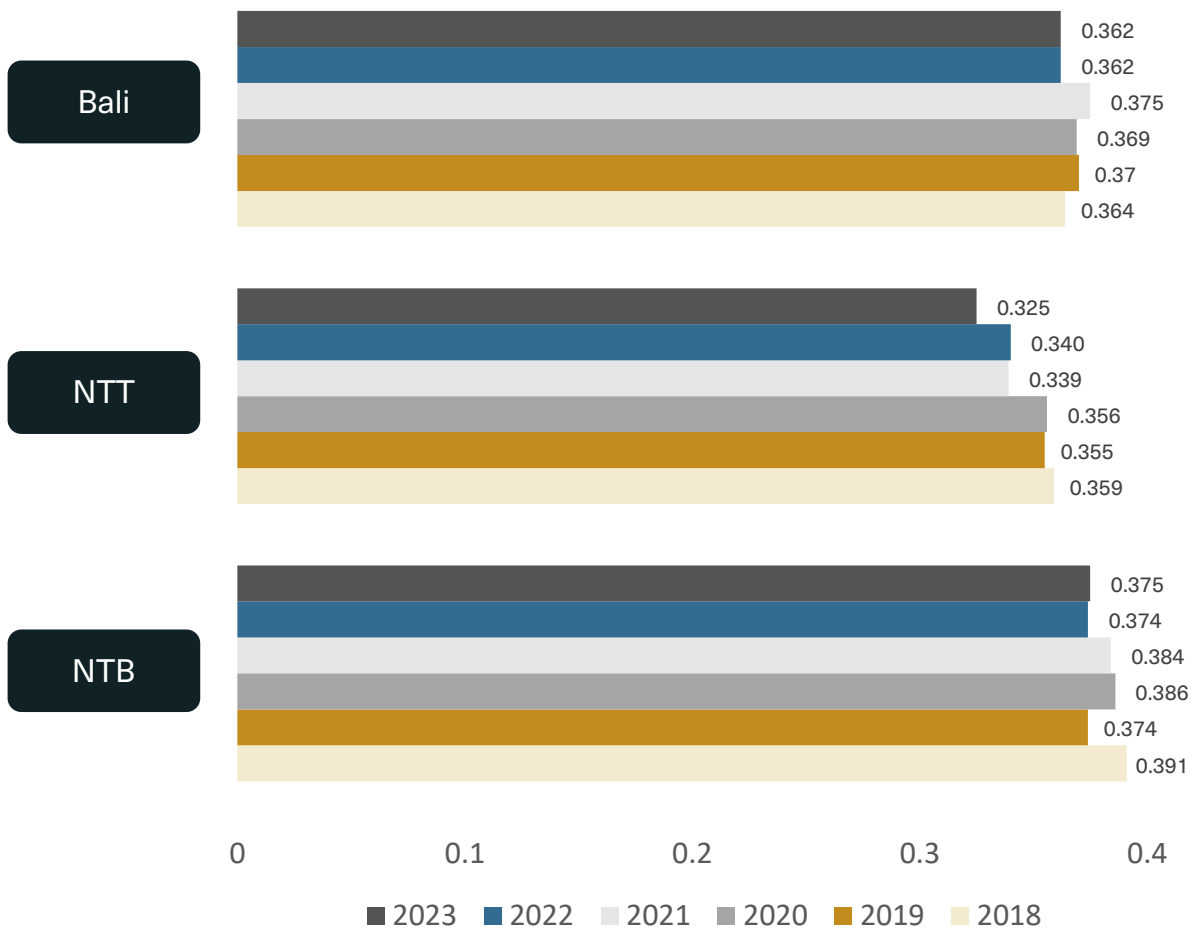


Tingkat pengangguran pada tahun 2022 terbuka di regional Bali dan Nusa Tenggara rata-rata mengalami penurunan menjadi 3,7% dari tahun sebelumnya sebesar 4,1% dan tahun 2023 diproyeksikan turun menjadi sebesar 3,1%.



Secara spasial, pada tahun 2022 tingkat pengangguran terbuka tertinggi di regional Bali dan Nusa Tenggara berada di provinsi Bali sebesar 4,8%, sedangkan persentase tingkat pengangguran terbuka terendah berada di provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 2,89%. Selanjutnya, pada tahun 2023 tingkat pengangguran terbuka tertinggi diproyeksikan masih berada di provinsi Bali sebesar 3,85%, sedangkan tingkat pengangguran terbuka terendah diproyeksikan berada di provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 3,85%. Sementara itu, penurunan tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2022 terjadi di seluruh provinsi di regional Bali dan Nusa Tenggara, penurunan tertinggi tingkat pengangguran terbuka dicapai oleh provinsi Bali sebesar 0,57%.

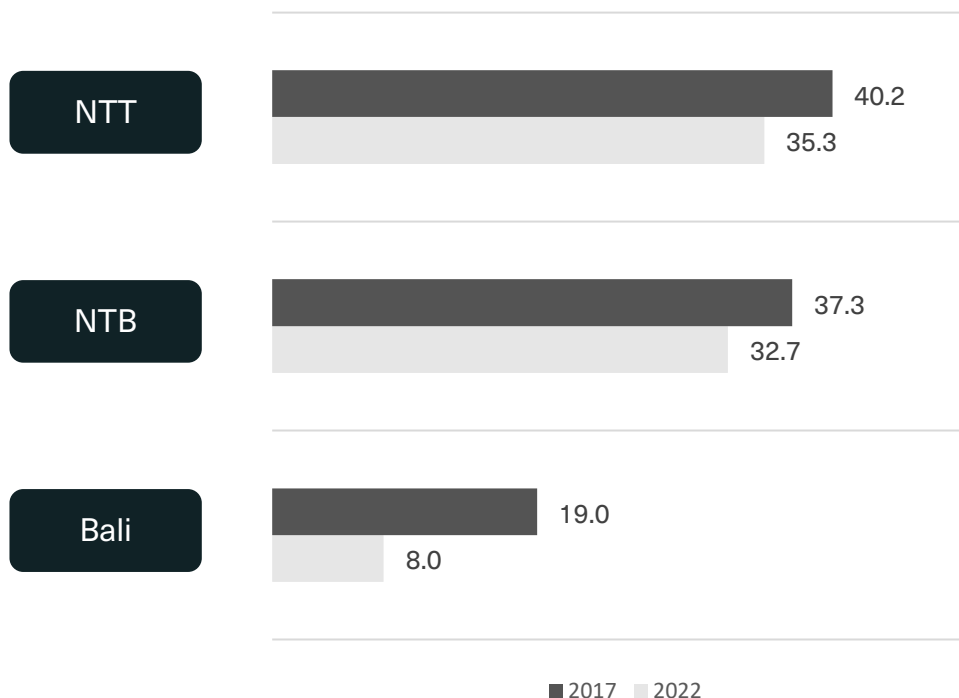
Rasio Gini



Ketimpangan pendapatan di regional Bali dan Nusa Tenggara terus menurun dari rata-rata sebesar 0,366 di tahun 2021, turun menjadi rata-rata sebesar 0,359 di tahun 2023 lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 0,354.

Secara spasial, pada tahun 2023 ketimpangan pendapatan tertinggi di regional Bali dan Nusa Tenggara berada di provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 0,375 meningkat 0,001 dari tahun 2022, sedangkan ketimpangan pendapatan terendah berada di provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,325. Penurunan ketimpangan pendapatan tertinggi dicapai oleh provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 0,015.

Stunting



Secara umum kinerja kesehatan pada tahun 2022 dalam menurunkan persentase stunting di regional Bali dan Nusa Tenggara menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun 2017. Rata-rata angka persentase stunting di regional Bali dan Nusa Tenggara pada tahun 2022 sebesar 25,3% menurun dibanding tahun 2017 sebesar 32,2%.

Secara spasial, pada tahun 2022 persentase stunting tertinggi di regional Bali dan Nusa Tenggara berada di provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 35,3%, sedangkan persentase stunting terendah berada di provinsi Bali sebesar 8%. Sementara itu, penurunan persentase stunting pada tahun 2022 terjadi di seluruh provinsi di regional Bali dan Nusa Tenggara dibanding tahun 2017. Penurunan persentase stunting tertinggi dicapai oleh provinsi Bali Tengah sebesar 11% sedangkan penurunan terendah berada di provinsi Nusa Tenggara Barat yang hanya turun sebesar 4,6%.

KINERJA SEKTORAL DAN SPASIAL DAERAH



Analisis LQ dan DLQ

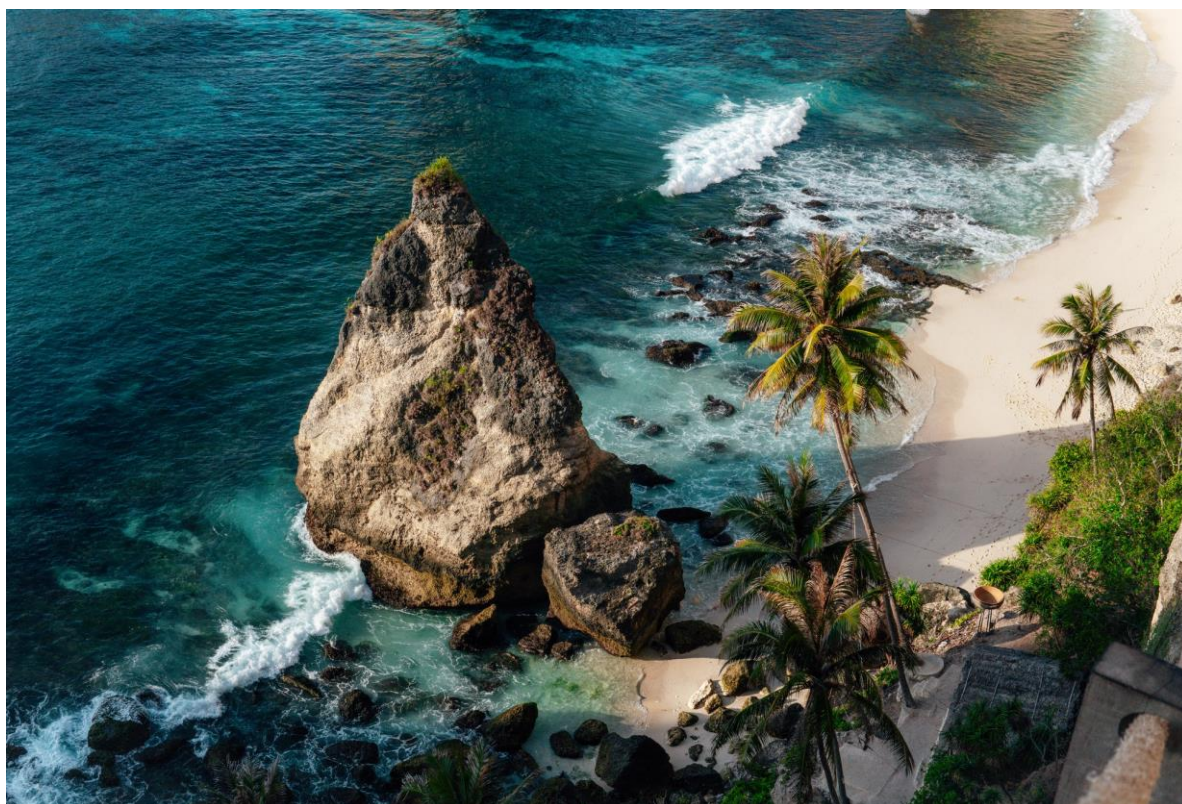
Dalam edisi sebelumnya telah di bahas mengenai dasar penentuan sektor unggulan dan potensial secara nasional berdasarkan empat metode yakni *Location Quotient* (LQ), *Dynamic Location Quotient* (DLQ), Model Rasio Pertumbuhan (MRP) dan analisis *overlay*. Dalam edisi kali ini, dengan metode dan basis data yang sama yakni tahun 2016-2022, akan dikaji lebih mendalam khususnya di wilayah region Bali dan Nusa Tenggara.

Adapun LQ merupakan analisis untuk menentukan sektor basis berdasarkan data historis. Sedangkan DLQ untuk memetakan sektor yang memiliki potensi di masa mendatang berdasarkan keunggulan laju pertumbuhan sektor tertentu dibanding nasional. Menurut hasil penghitungan dengan metode LQ dan DLQ, diketahui hasil sebagaimana dilihat dalam Tabel 1. Provinsi Bali yang dikenal memiliki kekuatan dalam sektor pariwisata yang dianggap diwakili oleh sektor Akomodasi, Makanan, dan Minuman memang memiliki rerata LQ paling tinggi yakni 5,69 poin. Hal ini artinya sektor Akomodasi, Makanan, dan Minuman merupakan sektor basis yang memiliki keunggulan komparatif secara pendapatan (relatif dibandingkan dengan sektor lain di Provinsi Bali maupun nasional). Namun, meskipun secara analisis LQ demikian, analisis DLQ sebaliknya. Analisis DLQ justru menunjukkan bahwa laju pertumbuhan sektor ini relatif terhadap nasional tidak terlalu tinggi. Hal ini dimungkinkan karena sektor ini telah menjadi sektor yang *mature* sehingga laju pertumbuhannya tidak sepesat sektor lain diantaranya Sektor Konstruksi, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estat, Jasa Pendidikan, serta Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Meskipun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi sektor Akomodasi, Makanan, dan Minuman terhadap perekonomian Bali cukup tinggi yakni sekitar 19,54% dari PDRB triwulan II 2023. Sektor yang memiliki proporsi tertinggi kedua adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (13,68% triwulan II 2023). Sektor ini secara analisis LQ dan DLQ merupakan sektor basis dan potensial untuk terus dikembangkan di masa depan.



Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor yang paling dominan dengan proporsi mencapai 30,22% dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi NTT. Hal ini sejalan dengan hasil analisis LQ dan DLQ di mana, sektor ini merupakan sektor basis sekaligus yang potensial untuk terus dikembangkan di masa depan. Selanjutnya, untuk sektor basis dengan koefisien tertinggi adalah sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial (Jamsos) Wajib. Tingginya sektor ini diduga karena masih tingginya proporsi belanja pemerintahan dalam menggerakkan perekonomian di wilayah NTT. Sektor yang dapat menjadi *highlight* dalam konteks wilayah NTT lainnya adalah sektor Jasa Keuangan dan Asuransi. Sektor jasa merupakan cerminan reformasi struktural di mana perekonomian mulai beralih ke sektor yang memiliki nilai tambah yang lebih tinggi yang biasanya berbasis jasa. Meskipun hingga triwulan II 2023 sektor ini relatif bukan sektor yang dominan (4,31%), namun secara statistik sektor ini memiliki potensi lebih untuk dapat dikembangkan dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi NTT.

Kemudian untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sektor basis yang memiliki koefisien tertinggi adalah sektor Pertambangan dan Penggalian. Hal ini karena NTB terkenal dengan kandungan galian non migas sekaligus komoditas ekspornya yakni emas perhiasan. Meskipun secara proporsi PDRB sektor ini menempati urutan kedua (15,01% tw.II 2023) setelah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (23,62% tw.II 2023), namun nilai ekspor dari sektor ini berkontribusi pada 94,51% total ekspor NTB dan membuat neraca perdagangan Provinsi NTB pada September 2023 mengalami surplus sebesar USD 52,20 juta. Adapun bila dilihat dari pola sektor yang menjadi basis dan potensial, NTB memiliki banyak peluang pengembangan sektoral baik di sektor primer maupun sektor jasa.



Analisis Overlay

Selanjutnya untuk melengkapi analisis LQ dan DLQ, secara komprehensif hasil analisis overlay akan memberikan informasi mengenai sektor yang memiliki keunggulan komparatif dan dapat dijadikan prioritas pembangunan oleh daerah. Adapun perlu disampaikan bahwa informasi ini bersifat pertimbangan dan bukan rekomendasi karena Daerah yang lebih mengetahui kondisi wilayahnya masing-masing.

Tabel 1 – Hasil Analisis LQ dan DLQ

PROVINSI	SEKTOR	RERATA LQ	DLQ
BALI	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.137	1.034
	Konstruksi	1.011	1.191
	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.086	1.039
	Real Estat	1.551	1.031
	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos Wajib	1.730	1.039
	Jasa Pendidikan	1.725	1.102
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.095	1.014
NUSA TENGGARA TIMUR	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.232	1.058
	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.027	1.075
	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos Wajib	3.880	1.145
NUSA TENGGARA BARAT	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.823	1.099
	Pertambangan dan Penggalian	2.355	1.044
	Adm. Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos Wajib	1.518	1.165
	Jasa Pendidikan	1.391	1.159
	Jasa lainnya	1.270	1.062

Terkait hasil overlay, Bali memiliki sektor basis pada akomodasi makanan dan minuman karena secara nominal tingkat pertumbuhan sektor tinggi namun terkategori sudah mulai *mature* dan stabil. Lebih lanjut lagi, ada beberapa sektor yang memiliki ruang pengembangan yang cukup luas di Bali diantaranya sektor Konstruksi, Jasa Keuangan dan Asuransi, *Real Estate*, Jasa Pendidikan, dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Pembangunan fasilitas infrastruktur perumahan jasa pendidikan dan kesehatan memiliki potensi berkembang mengingat besarnya investasi baik dalam maupun luar negeri di Bali. Hal ini juga berlaku pada jasa keuangan dan asuransi yang juga memiliki tren pertumbuhan menguat di oktober 2023. Dilihat dari jenisnya, kebanyakan sektor yang potensial untuk menjadi prioritas Pembangunan adalah sektor jasa yang relatif memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Selanjutnya, untuk Provinsi NTT, Jasa Keuangan dan Asuransi memiliki pertumbuhan dominan dan potensial sehingga hasil analisis overlay menempatkan sektor ini dalam kategori prioritas pertama. Berikutnya untuk Provinsi NTB, hasil analisis overlay menunjukkan bahwa sektor Jasa Pendidikan memiliki kategori pertumbuhan yang dominan dan potensial yang dapat dijadikan alternatif arah pembangunan sektoral pemda. Adapun lebih rinci dari kategori setiap sektor dapat dilihat pada Tabel 2.



Tabel 2 – Hasil Analisis Overlay

PROVINSI BALI				
SEKTOR	RP _s	RP _r	Klasifikasi Pertumbuhan	Prioritas Pembangunan
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.604	0.714	Rendah potensial	Prioritas kedua
2. Pertambangan dan Penggalian	-0.088	0.360	Rendah tak potensial	Prioritas Keempat
3. Industri Pengolahan	0.536	0.969	Rendah tak potensial	Prioritas Keempat
4. Pengadaan Listrik dan Gas	0.754	0.510	Rendah tak potensial	Prioritas ketiga
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.347	1.159	Rendah potensial	Prioritas kedua
6. Konstruksi	1.307	0.907	Dominan tak potensial	Prioritas pertama
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	0.837	1.097	Rendah tak potensial	Prioritas kedua
8. Transportasi dan Pergudangan	-0.430	1.073	Rendah potensial	Prioritas kedua
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0.100	1.066	Rendah potensial	Prioritas kedua
10. Informasi dan Komunikasi	0.574	2.601	Rendah potensial	Prioritas kedua
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	0.702	1.034	Rendah potensial	Prioritas pertama
12. Real Estat	0.714	1.103	Rendah potensial	Prioritas pertama
13. Jasa Perusahaan	0.653	1.468	Rendah tak potensial	Prioritas ketiga
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jamsos Wajib	0.540	0.548	Rendah potensial	Prioritas kedua
15. Jasa Pendidikan	0.952	1.054	Rendah potensial	Prioritas pertama
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.766	2.034	Rendah potensial	Prioritas pertama
17. Jasa lainnya	0.855	1.384	Rendah tak potensial	Prioritas kedua
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR				
SEKTOR	RP _s	RP _r	Klasifikasi Pertumbuhan	Prioritas Pembangunan
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.171	0.714	Dominan potensial	Prioritas kedua
2. Pertambangan dan Penggalian	0.145	0.360	Rendah tak potensial	Prioritas Kelima
3. Industri Pengolahan	0.787	0.969	Rendah tak potensial	Prioritas Kelima
4. Pengadaan Listrik dan Gas	3.746	0.510	Dominan tak potensial	Prioritas ketiga
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.010	1.159	Dominan tak potensial	Prioritas kedua
6. Konstruksi	0.723	0.907	Rendah potensial	Prioritas keempat
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1.041	1.097	Dominan tak potensial	Prioritas kedua
8. Transportasi dan Pergudangan	0.625	1.073	Rendah potensial	Prioritas ketiga
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.210	1.066	Dominan tak potensial	Prioritas kedua
10. Informasi dan Komunikasi	0.611	2.601	Rendah potensial	Prioritas ketiga
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.196	1.034	Dominan potensial	Prioritas pertama
12. Real Estat	0.550	1.103	Rendah tak potensial	Prioritas keempat
13. Jasa Perusahaan	-0.897	1.468	Rendah tak potensial	Prioritas keempat
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos Wajib	1.781	0.548	Dominan potensial	Prioritas kedua
15. Jasa Pendidikan	0.556	1.054	Rendah potensial	Prioritas ketiga
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.764	2.034	Rendah potensial	Prioritas ketiga
17. Jasa lainnya	0.045	1.384	Rendah potensial	Prioritas ketiga
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT				
SEKTOR	RP _s	RP _r	Klasifikasi Pertumbuhan	Prioritas Pembangunan
1. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.777	0.714	Rendah potensial	Prioritas ketiga
2. Pertambangan dan Penggalian	-1.128	0.360	Rendah potensial	Prioritas ketiga
3. Industri Pengolahan	0.668	0.969	Rendah tak potensial	Prioritas keempat
4. Pengadaan Listrik dan Gas	4.285	0.510	Dominan tak potensial	Prioritas ketiga
5. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.543	1.159	Rendah tak potensial	Prioritas ketiga
6. Konstruksi	0.822	0.907	Rendah tak potensial	Prioritas keempat
7. Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor	1.000	1.097	Dominan tak potensial	Prioritas kedua
8. Transportasi dan Pergudangan	-0.153	1.073	Rendah potensial	Prioritas ketiga
9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.052	1.066	Rendah tak potensial	Prioritas keempat
10. Informasi dan Komunikasi	0.711	2.601	Rendah tak potensial	Prioritas keempat
11. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.738	1.034	Dominan tak potensial	Prioritas kedua
12. Real Estat	0.958	1.103	Rendah tak potensial	Prioritas ketiga
13. Jasa Perusahaan	0.681	1.468	Rendah tak potensial	Prioritas ketiga
14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jamsos Wajib	1.134	0.548	Dominan potensial	Prioritas kedua
15. Jasa Pendidikan	1.051	1.054	Dominan potensial	Prioritas pertama
16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.631	2.034	Rendah potensial	Prioritas ketiga
17. Jasa lainnya	0.767	1.384	Rendah potensial	Prioritas kedua



KINERJA TRANSFER KE DAERAH

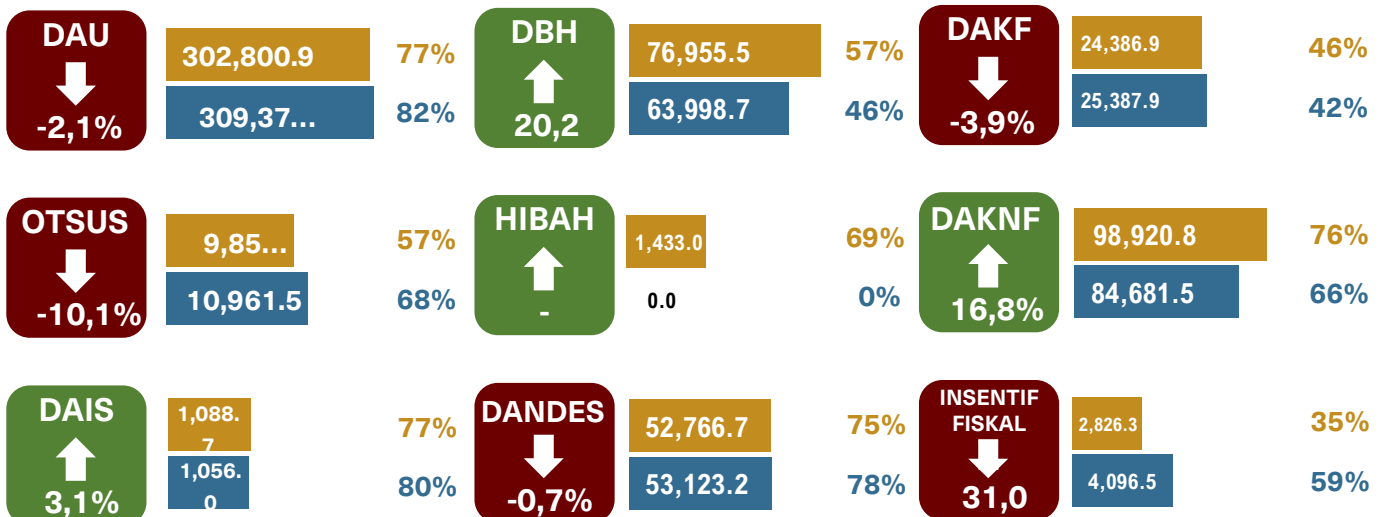


Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara, yang kemudian akan dialokasikan dan disalurkan ke daerah untuk dikelola oleh pemerintah daerah, dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. TKD dilaksanakan dalam rangka mendukung pendanaan penyelenggaraan urusan daerah serta pembangunan sarana prasarana dan operasionalisasi layanan publik di daerah.

TRANSFER KE DAERAH

↑ 3,3%

2023 : Rp571,0 T (70,1%)
2022 : Rp552,7 T (68,7%)



Kinerja penyaluran TKD sampai dengan akhir September 2023 mencapai Rp571,0 Triliun atau tersalur 70,1% dari pagu alokasi TKD 2023. Dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, kinerja TKD secara nominal mengalami pertumbuhan sebesar 3,3% year on year (YoY). Peningkatan tersebut terutama karena terdapat kenaikan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik serta Dana Keistimewaan DIY. Masih terdapat beberapa jenis TKD yang kinerja penyalurannya masih lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya terutama karena pemda sedang menyiapkan pemenuhan syarat penyaluran.

DBH telah disalurkan kepada pemda sebesar Rp76,9 Triliun atau telah salur sebesar 57% dari pagu DBH tahun 2023. Secara nominal, kinerja penyaluran DBH meningkat sebesar 20,2% YoY. Meningkatnya kinerja penyaluran DBH dikarenakan adanya peningkatan pagu alokasi DBH CHT, DBH Minerba, dan DBH Migas pada tahun 2023 ini yang disebabkan naiknya volatilitas harga komoditas dunia.

DAK Nonfisik per 30 September 2023 telah disalurkan sebesar Rp98,9 Triliun atau 76% dari pagu alokasi 2023, realisasi tersebut tumbuh 16,8% jika dibandingkan dengan realisasi DAK Nonfisik tahun 2022 pada periode yang sama. Kenaikan tersebut terutama disebabkan karena peningkatan kepatuhan penyampaian syarat salur.

Penyaluran dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan sebesar 3,1% YoY. Dana keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah salur sebesar Rp 1,08 Triliun atau telah salur sebesar 77% dari pagu Dana Keistimewaan DIY. Peningkatan kinerja penyaluran yang sangat tinggi disebabkan adanya percepatan penyampaian syarat salur tahap II berupa penyampaian laporan realisasi penyerapan dan laporan pencapaian kinerja Tahap I.

Sejak tahun 2023, hibah daerah sebagai bagian dalam alokasi TKD. Hibah daerah yang telah salur sampai dengan September 2023 sebesar Rp1,4 Triliun yang bersumber dari pinjaman luar negeri yang diterushibahkan dan hibah luar negeri yang diterushibahkan. Adapun komponen Hibah ke Daerah yang bersumber dari Penerimaan Dalam Negeri sampai dengan 30 September 2023 belum mencatatkan adanya realisasi dikarenakan masih dalam proses pelaksanaan dan menunggu hasil revidi APIP terlebih dahulu.

DAK Fisik merupakan salah komponen yang mengalami perlambatan realisasi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yakni turun 3,9% YoY atau sebesar Rp25,3 Triliun pada tahun 2022 dan sebesar Rp24,3 Triliun pada tahun 2023 hal ini disebabkan pagu lebih rendah dari tahun sebelumnya. Namun, secara persentase rasio penyaluran antara alokasi anggaran dan realisasi nya mengalami peningkatan sebesar 4%.

Penurunan kinerja penyaluran TKD juga terjadi pada Dana Desa yang sedikit lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar -0,7% YoY. Dana Desa yang telah salur sampai dengan 30 September 2023 sebesar Rp52,7 Triliun atau telah salur sebesar 75% dari pagu Dana Desa. Penurunan ini antara lain disebabkan karena belum disalurkan nya tambahan Dana Desa yang masih berproses.

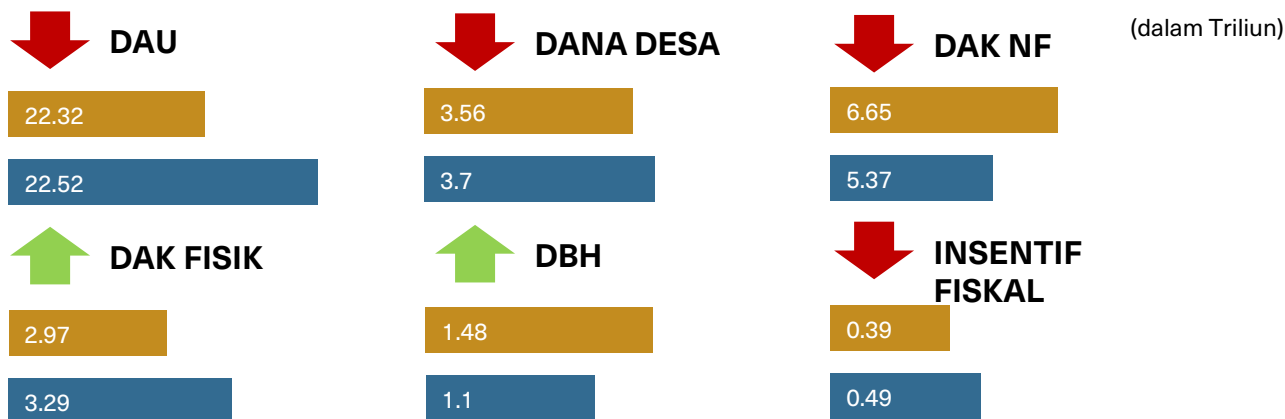
Kinerja penyaluran insentif fiskal lebih rendah 31,0% YoY. Insentif fiskal yang telah salur sampai dengan 30 September 2023 sebesar Rp2,8 Triliun atau telah salur sebesar 35,0%. Hal ini antara lain dikarenakan pada TA 2022 ada penyaluran insentif fiskal tahun berjalan sebesar Rp1,5 Triliun secara sekaligus. Sedangkan insentif fiskal tahun berjalan TA 2023 belum disalurkan karena baru ditetapkan di bulan Oktober 2023.



Di sisi lain, kinerja penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami kontraksi sebesar -2,1%. DAU yang telah salur sampai dengan 30 September 2023 sebesar Rp302,8 Triliun atau 77% dari pagu DAU. Belum tersalurkannya DAU karena Pemda saat ini sedang menyiapkan syarat salur untuk DAU yang ditentukan penggunaannya. Kendala dari penyiapan syarat salur antara lain karena Pemda belum sepenuhnya mengajukan reimburse DAU Penggajian formasi PPPK untuk setiap bulan. Untuk itu, sebagai strategi percepatan DJPK akan terus melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pemda dengan berkolaborasi bersama Kemendagri dan K/L terkait, serta unit Kementerian Keuangan di daerah.

Turunnya kinerja penyaluran DAU diikuti juga dengan turunnya kinerja penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus). Sampai dengan 30 September 2023, penyaluran Dana Otsus lebih rendah 10,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dalam periode ini telah disalurkan sebesar Rp9,8 Triliun atau 57% dari pagu Dana Otonomi Khusus. Turunnya kinerja salur Dana Otonomi Khusus disebabkan oleh belum seluruhnya provinsi-provinsi di Papua telah salur Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastrukturnya. Dana-dana tersebut belum salur dikarenakan beberapa pemerintah daerah di Provinsi Papua belum menyampaikan hasil validasi atas integrasi rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi/kabupaten/kota. Selain itu karena penurunan alokasi Otsus Aceh dari 2% menjadi 1% dari DAU Nasional.

Kinerja TKD Pulau Bali dan Nusa Tenggara



Selaras dengan kinerja Pemerintah Pusat, kinerja TKD untuk pemda se-pulau Bali Nusra juga tumbuh dari periode yang sama tahun lalu. Sampai dengan akhir September 2023, TKD se-pulau Bali Nusra telah tersalurkan sebesar Rp37,3 Triliun atau tumbuh 2,2% y.o.y. Pertumbuhan ini secara garis besar ditopang oleh pertumbuhan DBH yang tumbuh 33,9% dan DAK Nonfisik yang tumbuh 23,8 y.o.y.

Secara lebih detail, penerimaan DBH yang besar ini disebabkan oleh kenaikan harga komoditas dunia yang mengakibatkan realisasi penerimaan DBH Minerba yang merupakan sumber-sumber utama dari pendapatan khususnya pada wilayah pulau NTB dan NTT naik melebihi prognosa yang telah dialokasikan pada awal tahun. Selain DBH, kinerja DAK Nonfisik juga tumbuh di wilayah pulau Bali Nusra per September 2023. Dana DAK Nonfisik untuk wilayah ini telah tersalurkan Rp6,6 Triliun atau tumbuh 23,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja DBH dan DAK Nonfisik yang sudah baik ini perlu terus dipertahankan agar TKD dapat segera dinikmati untuk layanan publik di daerah.





Di sisi lain, kinerja TKD untuk pemda di wilayah Bali Nusra yaitu pada jenis TKD: DAU, DAK Fisik, Insentif Fiskal dan Dana Desa yang pada periode September 2023 ini masih lebih rendah dari periode yang sama tahun sebelumnya. Penyaluran DAU pada periode ini sebesar Rp22,3 Triliun atau lebih rendah 0,9% y.o.y. Kinerja penyaluran DAU yang lebih rendah tersebut antara lain disebabkan karena pemda sedang berproses untuk menyiapkan syarat salur DAU yang ditentukan penggunaannya (DAU earmarked) khususnya untuk penggajian formasi P3K masih terdapat kendala di seluruh daerah di Indonesia. Kondisi ini perlu menjadi perhatian bagi pemda, termasuk pemda di wilayah Bali Nusra agar bisa memonitor perkembangan rekrutmen dan pengangkatan P3K sehingga pada saat gaji P3K dapat direalisasikan pemda dapat segera menyampaikan syarat salur DAU dimaksud.

Selain DAU, kinerja penyaluran DAK Fisik juga lebih rendah dari tahun sebelumnya. DAK Fisik sudah tersalur sebesar Rp2,9 Triliun atau terkontraksi 9,7% y.o.y. Kinerja DAK Fisik yang masih lebih rendah dari tahun lalu tersebut antara lain disebabkan karena sebagian daerah belum menyampaikan syarat salurnya. Selanjutnya, kinerja penyaluran insentif fiskal juga terkontraksi 3,6% pada bulan ini. Jika pada periode yang sama tahun lalu penyaluran insentif fiskal telah mencapai Rp0,49 Triliun, di periode September 2023 pemda di pulau Bali Nusra baru mencatat penyaluran sebesar Rp0,39 Triliun. Terakhir, kinerja penyaluran Dana Desa di pulau Bali Nusra juga melambat 3,6% y.o.y. Di tahun lalu, kinerja Dana Desa sudah mencapai Rp3,7 Triliun sedangkan pada periode September tahun ini baru mencapai Rp3,5 Trilliun. Kinerja yang masih lebih rendah dari tahun lalu tersebut antara lain disebabkan karena masih ada Dana Desa tambahan atau insentif Dana Desa yang masih dalam proses penyaluran. Reformasi TKD melalui UU HKPD menimbulkan beberapa perubahan dalam pengelolaan TKD.

Sesuai dengan reform yang diamanahkan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemda diharapkan dapat lebih agile untuk mengikuti perubahan dimaksud karena TKD merupakan salah satu sarana bagi pemda untuk dapat mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.



KINERJA FISKAL DAERAH



SUMMARY

Kinerja fiskal daerah sampai dengan bulan September 2023 juga secara konmenunjukkan perbaikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu baik dalam aspek pendapatan maupun belanja daerah. Pendapatan Asli Daerah tumbuh selaras dengan peningkatan akitifitas dan konsumsi masyarakat daerah. Dari aspek Belanja Daerah, serapan APBD terus membaik akibat terjadinya peningkatan realisasi yang terjadi pada seluruh jenis belanja baik belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal serta belanja lainnya. Kinerja fiskal daerah yang baik tersebut perlu terus dipertahankan hingga akhir tahun agar perekonomian daerah terus tumbuh.

Sampai dengan akhir September 2023, pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp234,2 Triliun atau tumbuh 3,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan kinerja PAD utamanya ditopang oleh pertumbuhan Pajak dan Retribusi Daerah serta penerimaan dari Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Secara komposisi, PAD didominasi oleh pendapatan dari pajak daerah (75%), Lain-lain PAD yang sah (18%), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan (5%) dan Retribusi Daerah (3%).

Per jenis PAD, Pajak Daerah telah mencapai sebesar Rp174,9 Triliun atau tumbuh 6,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Retribusi Daerah sampai dengan September 2023 juga turut tumbuh, mencapai Rp6,0 Triliun atau naik 4,7% secara y.o.y. Selanjutnya, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tumbuh tinggi 11,4% dibandingkan tahun sebelumnya atau mencapai Rp11,0 Triliun. Sementara itu, Lain-lain PAD yang sah sampai dengan bulan September 2023 masih berkontraksi 7,1% dibandingkan tahun sebelumnya atau sebesar Rp42,1 Triliun.



Secara lebih spesifik, kinerja pajak daerah s.d September 2023 menunjukkan semakin tingginya konsumsi masyarakat ini dicerminkan melalui adanya peningkatan persentase realisasi pajak yang bersifat konsumtif seperti Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang menunjukkan semakin bergeliatnya sektor pariwisata.

Peningkatan realisasi pajak bersifat konsumtif (y.o.y) pada bulan ini juga tercatat paling signifikan terjadi di wilayah Bali-Nusra sebagai wilayah dengan destinasi wisata yang banyak dituju oleh masyarakat. Di wilayah Bali, pendapatan dari pajak hotel mencapai Rp2,8 Triliun atau lebih tinggi 195,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Wilayah Nusa Tenggara Timur juga turut mencatatkan realisasi pertumbuhan pajak hotel yang tinggi mencapai Rp65,9 Miliar, atau tumbuh 26,8% dibandingkan tahun lalu. Pada wilayah Nusa Tenggara Barat yang juga memiliki kenaikan konsumtif yang tinggi, realisasi pajak hotel sudah mencapai Rp80,63 Miliar atau tumbuh 29,5% y.o.y.

Selain pajak yang terkait konsumsi, secara nasional beberapa jenis pajak lainnya juga turut tumbuh tinggi dibandingkan tahun lalu antara lain Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang tumbuh 19,6%, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan tumbuh 6,4% dan Pajak Air Tanah tumbuh 4,1%.

Selain Pajak Daerah, kinerja Retribusi Daerah s.d September 2023 juga tumbuh. Ditopang oleh peningkatan hasil retribusi perizinan tertentu dan retribusi jasa usaha yang masing-masing tumbuh 48,9% dan 7,1%.

Sementara retribusi jasa umum masih terkontraksi 10,8% dibandingkan dengan tahun lalu. Pada Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga mencatat yang disebabkan oleh pendapatan bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal milik swasta (1011,9%) dan bagian laba yang dibagikan atas penyertaan modal pada BUMD (11,0%). Lain-lain PAD yang sah masih terkontraksi 7,1% dibandingkan tahun lalu. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh penurunan pendapatan BLUD (-10,4%) dan penurunan jasa giro (-9,1%).

Dari sisi Belanja Daerah, realisasi sd September 2023 juga menunjukkan kinerja yang semakin membaik. Serapan belanja daerah sudah mencapai Rp701,5 Triliun atau tumbuh 5,5% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun apabila dibandingkan dengan pagu dalam APBD 2023, realisasi belanja daerah s.d September 2023 baru sebesar 54,8%. Meskipun sudah lebih baik dari tahun sebelumnya, kinerja serapan belanja daerah perlu terus di dorong agar tidak menumpuk pada akhir tahun.

Kinerja serapan yang baik ini ini dikontribusikan dari seluruh jenis belanja. Belanja pegawai tumbuh 2,1% yang disebabkan oleh peningkatan realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN, belanja tambahan penghasilan ASN dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Belanja Barang dan Jasa tumbuh 5,2% yang disebabkan kenaikan belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjudin dan belanja jasa kepada pihak ketiga.



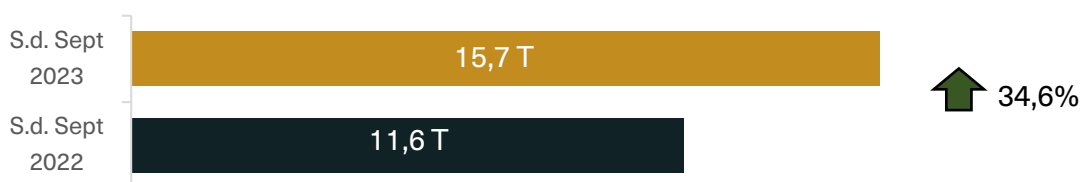
Belanja Modal tumbuh 14,6%, karena peningkatan belanja modal jalan dan jembatan, bangunan gedung, bangunan air, alat kantor dan rumah tangga. Belanja Lainnya tumbuh 8,1%, karena peningkatan belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa, belanja bagi hasil pajak daerah kepada kab/kota dan desa, serta belanja hibah kepada badan/Lembaga/ormas berbadan hukum.

Berbagai peningkatan tersebut juga sejalan dengan pertumbuhan realisasi belanja fungsi ekonomi, fungsi perlindungan sosial (perlinsos) dan fungsi kesehatan yang tumbuh dibandingkan tahun lalu (y.o.y) masing 9,4%, 3,5%, dan 6,7%, selaras perbaikan kinerja serapan dan peningkatan aktifitas ekonomi di daerah. Pertumbuhan kinerja per fungsi ini menunjukkan dukungan daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan akses layanan kesehatan dan dukungan pemberian bantuan kepada masyarakat.

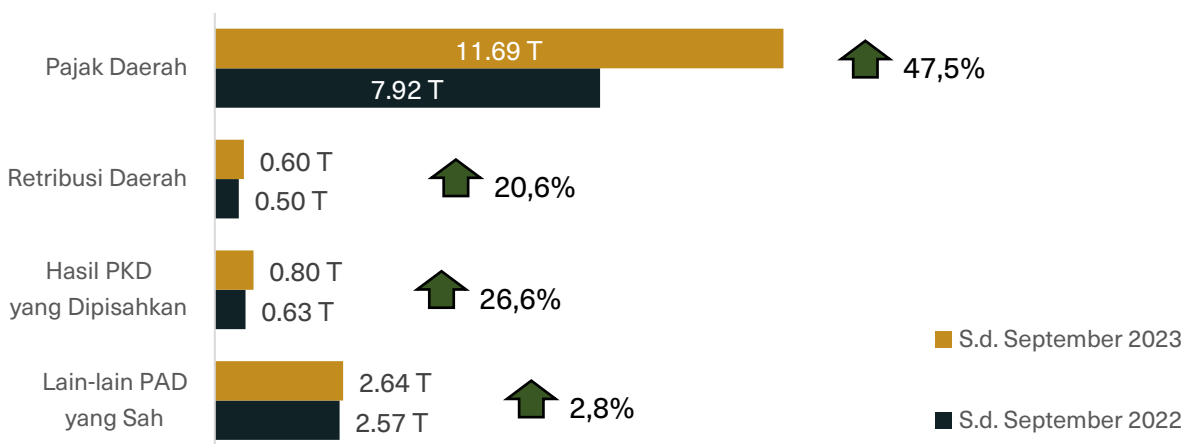
KINERJA APBD PULAU BALI NUSRA

Pada wilayah pulau Bali Nusra yang terdiri dari Provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat, kinerja PAD per September 2023 sebesar Rp15,7 Triliun, lebih tinggi 34,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan kinerja PAD tersebut utamanya dikontribusikan dari peningkatan pendapatan pajak daerah sebesar 47,5% diikuti pendapatan retribusi daerah yang meningkat 20,6%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang meningkat 26,6% dan lain-lain PAD yang sah yang tumbuh 2,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Secara proporsi, sekitar tiga perempat dari PAD merupakan pajak daerah (74,3%), lain-lain PAD yang sah sebesar 16,8% sedangkan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah dan retribusi daerah hanya masing-masing 5,1% dan 3,8% dari proporsi PAD

PENDAPATAN ASLI DAERAH



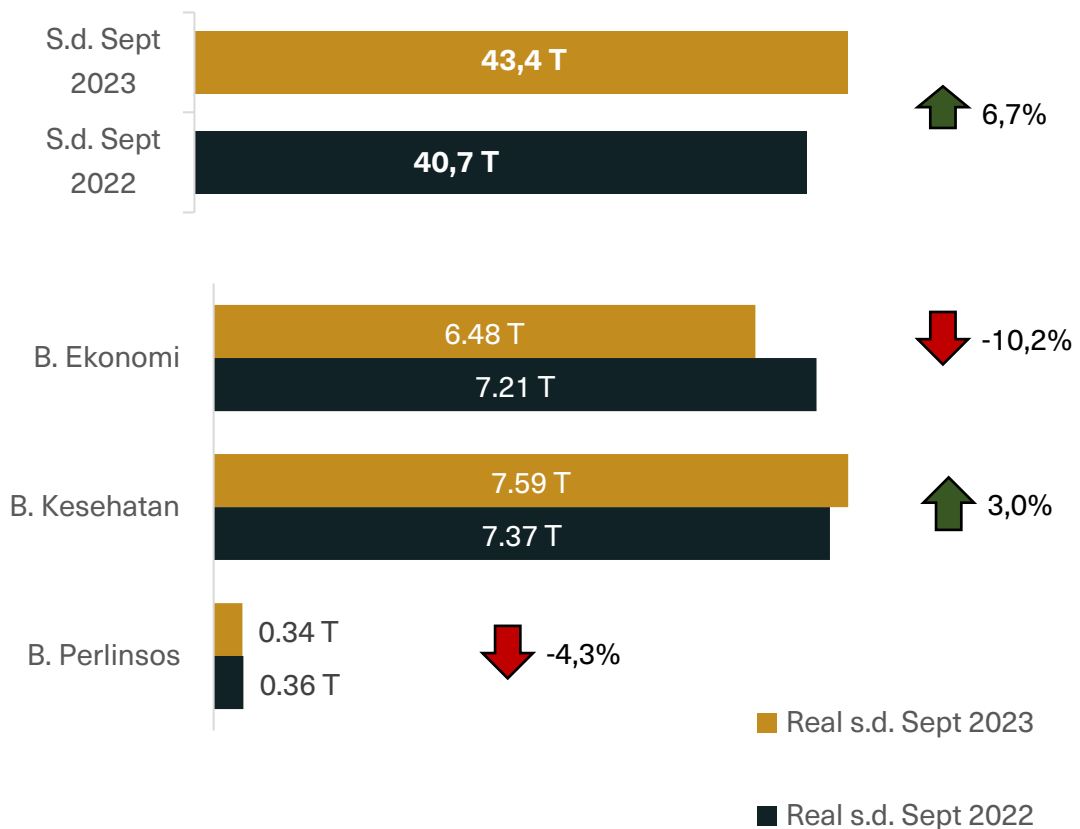
PENDAPATAN DAERAH



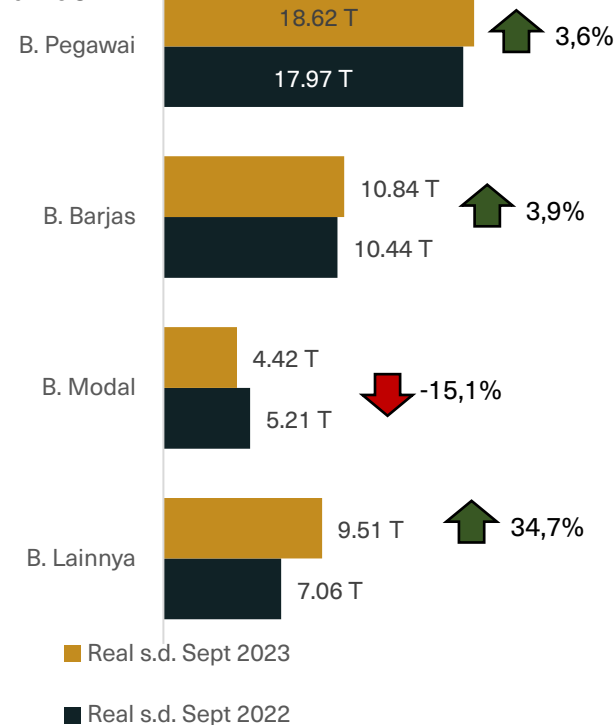
Per jenis pajak daerah, pertumbuhan pajak daerah tertinggi di pulau Bali Nusra sampai dengan September 2023 utamanya berasal dari pajak-pajak konsumtif seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir. Tertinggi merupakan realisasi Pajak Hotel yang tumbuh 177,6% YoY diikuti Pajak Hiburan yang tumbuh 162,2%, Pajak Restoran tumbuh 126,0% dan Pajak Parkir tumbuh 77,7%. Pertumbuhan pajak-pajak konsumtif tersebut dapat menandakan pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat di pulau Bali Nusra. Selain itu, hal ini juga turut mengindikasikan meningkatnya compliance dalam pembayaran pajak dimana pemerintah telah mengadopsi pendekatan pajak yang lebih efektif dalam mengumpulkan pajak-pajak, seperti penggunaan teknologi/digitalisasi untuk memantau dan mengelola pembayaran pajak.

Selain pajak konsumtif, pertumbuhan pajak daerah di pulau Bali Nusra juga ditopang oleh pajak terkait kepemilikan kendaraan bermotor seperti Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang tumbuh 63,3%, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang tumbuh 20,0% dan Pajak Kendaraan Bermotor dengan pertumbuhan 4,7% secara Y.o.Y. Kinerja perpajakan daerah perlu terus dioptimalkan antara lain terkait Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang turun 25,2% dan Pajak Reklame yang lebih rendah 8,6% dibandingkan tahun sebelumnya.

Belanja APBD



Dari sisi belanja, pulau Bali Nusra juga mencatatkan kinerja positif. Belanja APBD s.d September 2023 sebesar Rp43,4 Triliun. Pada periode yang sama tahun sebelumnya, realisasi belanja pulau Kalimantan hanya mencatat sebesar Rp40,6 Triliun. Terjadi pertumbuhan kinerja realisasi belanja sebesar 6,7% YoY. Pertumbuhan realisasi belanja yang baik ini ditopang oleh seluruh jenis belanja daerah kecuali Belanja Modal yang masih terkontraksi. Belanja Pegawai tumbuh 3,6% yang disebabkan karena kenaikan realisasi belanja gaji dan tunjangan ASN, tambahan penghasilan ASN dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Belanja Barang dan Jasa tumbuh 3,9% yang dikontribusikan dari peningkatan realisasi belanja barang, belanja uang dan/atau jasa kepada pihak ketiga, belanja barang dan jasa BLUD dan belanja perjalanan dinas.



Belanja Modal masih lebih rendah 15,1% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan yang lebih rendah ini utamanya penurunan realisasi belanja pada belanja modal jalan dan jembatan, belanja modal bangunan Gedung, belanja modal tanah dan belanja modal alat laboratorium. Pada jenis belanja lainnya, pertumbuhan kinerja realisasi tercatat cukup tinggi yaitu sebesar 34,7% YoY. Hal ini disebabkan antara lain oleh meningkatnya kinerja Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa dan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.

Kinerja belanja per fungsi di pulau Bali Nusra sd September 2023, khususnya terkait belanja fungsi ekonomi, Kesehatan dan perlinsos mengalami peningkatan hanya pada fungsi Kesehatan sedangkan belanja fungsi ekonomi dan belanja fungsi perlinsos masih terkontraksi. Kinerja realisasi belanja fungsi Kesehatan sebesar Rp7,5 Triliun atau meningkat 3,0%. Realisasi belanja fungsi ekonomi pada periode ini sebesar Rp6,4 Triliun atau lebih rendah 10,2% dari periode yang sama tahun lalu. Hal ini selaras dengan kinerja belanja modal yang juga masih terkontraksi karena Sebagian besar belanja fungsi ekonomi merupakan belanja modal. Realisasi belanja fungsi perlinsos juga mengalami perlambatan, sd September 2023 telah terealisasi sebesar Rp341,9 Miliar atau lebih rendah 4,3%. Kinerja realisasi belanja pulau Bali Nusra yang baik tersebut perlu terus dioptimalkan hingga akhir tahun. Hal ini penting agar realisasi tidak menumpuk pada akhir tahun sehingga tidak terjadi penundaan atau kurang optimalnya layanan publik akibat dari eksekusi belanja yang terlambat.



PERKEMBANGAN REFORMASI STRUKTURAL INDONESIA



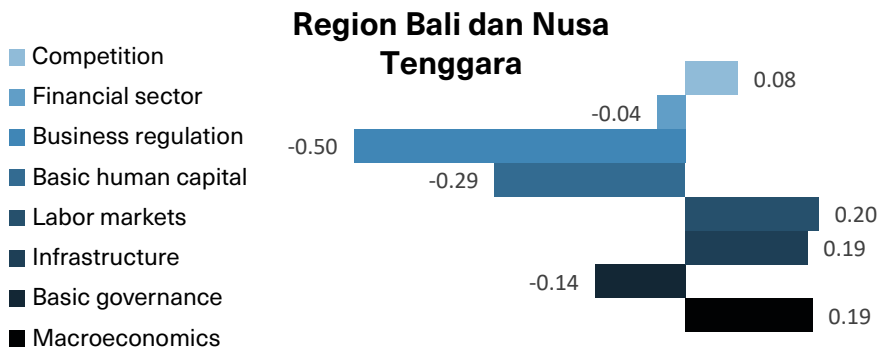
Di tajuk kali ini, kita akan melakukan ulasan lebih dalam mengenai reformasi struktural untuk region Bali Nusra. Pulau Bali Nusra juga merupakan bentangan pulau dengan keindahan alam yang eksotis serta akar budaya yang kuat sehingga sektor pariwisata menjadi salah satu aspek unggulan selain tentunya sector peternakan dan perikanan yang menjadi alternative mata pencaharian bagi penduduk sekitar.

Mekanisme yang digunakan untuk menilai reformasi struktural daerah adalah dengan melihat *z-score* yang menggambarkan data simpangan dari nilai rata-rata yang telah diukur dengan standar deviasinya. *Z-score* yang positif menggambarkan nilai yang lebih tinggi dari rata-rata, demikian pula sebaliknya, *z-score* yang negatif menggambarkan nilai yang lebih rendah dari rata-rata. Adapun variabel yang digunakan dalam penyusunan *z-score* ini adalah:

- a. *Macroeconomics*, yang dinilai dari variabel tingkat inflasi daerah. Menggunakan data inflasi tahun 2022 yang bersumber dari BPS
- b. *Basic Governance*, yang direpresentasikan dari Indeks Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan oleh MenPANRB, terakhir menggunakan data tahun 2021
- c. *Infrastructure*, dari indeks pelayanan publik bidang infrastruktur. Indeks ini disusun oleh DJPK dengan menggunakan variabel antara lain kondisi jalan mantap, kualitas internet, cakupan listrik, dll. Indeks ini menggunakan data terakhir yaitu tahun 2023
- d. *Basic human capital*, yang digambarkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Variabel ini bersumber dari BPS dan menggunakan data terakhir, yaitu IPM tahun 2022
- e. *Business Regulation*, yang digambarkan dengan indeks kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang bersumber dari BKPM dan menggunakan data tahun 2022

- f. *Labor markets*, digambarkan dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang bersumber dari BPS dan terakhir menggunakan data tahun 2022.
- g. *Financial sector*, yang digambarkan oleh pinjaman yang diberikan kepada masyarakat untuk modal kerja, investasi, dan konsumsi serta pemberian kredit kepada UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Data ini bersumber dari Bank Indonesia dengan menggunakan data tahun 2022
- h. *Competition*, yang digambarkan dengan Indeks Daya Saing Daerah. Indeks ini bersumber dari BRIN yang dapat menggambarkan daya saing daerah pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota serta faktor-faktor pendorongnya diantaranya adalah aspek infrastruktur. Indeks ini menggunakan data tahun 2022

Secara keseluruhan, reformasi struktural di region Bali dan Nussa tenggara dapat dikatakan cukup berimbang. Empat aspek memiliki rata-rata yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, sementara empat aspek lainnya memiliki rata-rata yang lebih rendah dari rata-rata nasional. Aspek yang memiliki simpangan positif terbesar adalah *labor markets*, sebesar 0,2. Region Bali dan Nusa Tenggara memiliki potensi yang kuat di sektor pariwisata, hingga berdampak pada terbukanya lapangan pekerjaan yang lebih luas. Sektor pariwisata mencakup berbagai aspek, termasuk akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, rekreasi, dan layanan lainnya, yang menciptakan peluang pekerjaan yang beragam, mulai dari pelayan restoran, pemandu wisata, hingga petugas kebersihan. Sebagian besar pekerjaan dalam sektor pariwisata ini tidak memerlukan kualifikasi khusus atau pendidikan tinggi, sehingga memberikan lapangan pekerjaan yang lebih luas bagi tenaga kerja yang belum berpengalaman.



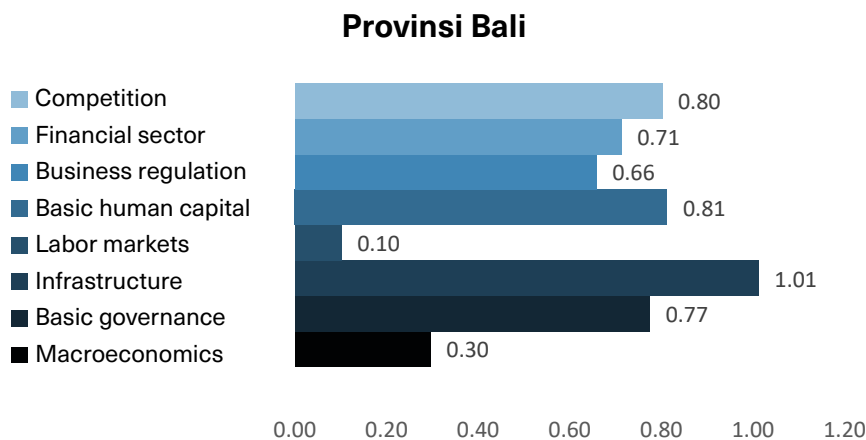
Demikian juga dengan sektor infrastruktur yang memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi dengan pariwisata. Kondisi infrastruktur yang baik dapat meningkatkan daya tarik pariwisata suatu wilayah, sementara sektor pariwisata yang berkembang dengan baik juga dapat memacu perkembangan infrastruktur, dan ini terlihat dari tingginya indeks infrastruktur di region Bali Nusra dibanding rata-rata nasional sebesar 0,19.

Sementara aspek yang memiliki z-score negatif terbesar adalah *business regulation* dan *basic human capital*. *Business regulation* yang direpresentasikan oleh indeks Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang rendah di region Bali Nusra, dikarenakan nilai PTSP di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mayoritas sangat rendah. Hal serupa juga terjadi pada *basic human capital* yang rata-ratanya lebih rendah dari rata-rata nasional, dimana sebagian besar berasal dari rendahnya nilai IPM di daerah-daerah di Provinsi NTT.

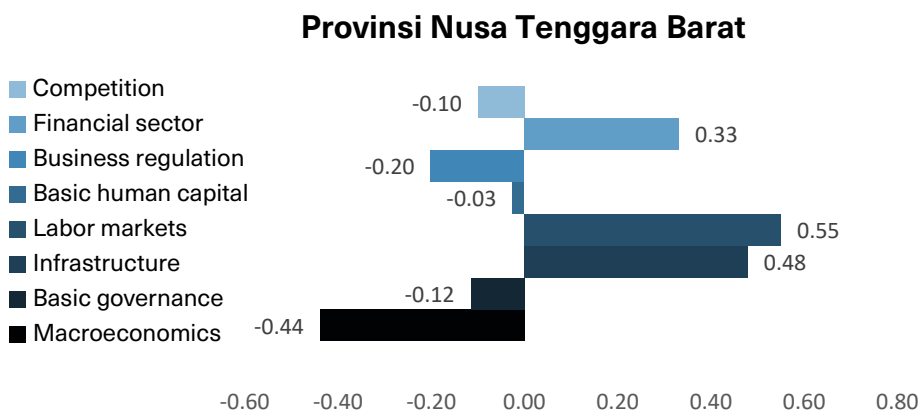


Pada tahun 2022, IPM di Provinsi NTT bahkan merupakan nomor 3 terendah setelah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

Di antara 3 provinsi yang berada di region Bali Nusra, Provinsi Bali memiliki kinerja reformasi struktural yang sangat baik, di mana semua aspek memiliki simpangan positif yang lebih besar dibanding rata-rata nasional. Aspek yang memiliki simpangan tertinggi adalah *infrastructure* sebesar 1,01. Peningkatan infrastruktur ini dipicu salah satunya oleh pertumbuhan ekonomi yang semakin baik di Bali, yang pada triwulan IV 2022 tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 6,61% (yoy). Pertumbuhan ini dipicu antara lain dari pulihnya kinerja pariwisata di Bali, setelah pada tahun 2020-2021 sempat surut karena pandemi COVID-19, namun pada tahun 2022 kunjungan wisata mulai kembali meningkat seiring dengan pelonggaran kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Peningkatan infrastruktur ini didukung pula oleh adanya proyek konstruksi untuk mendukung kesuksesan pelaksanaan *event* puncak KTT G20 Presidential Summit pada bulan November 2022.



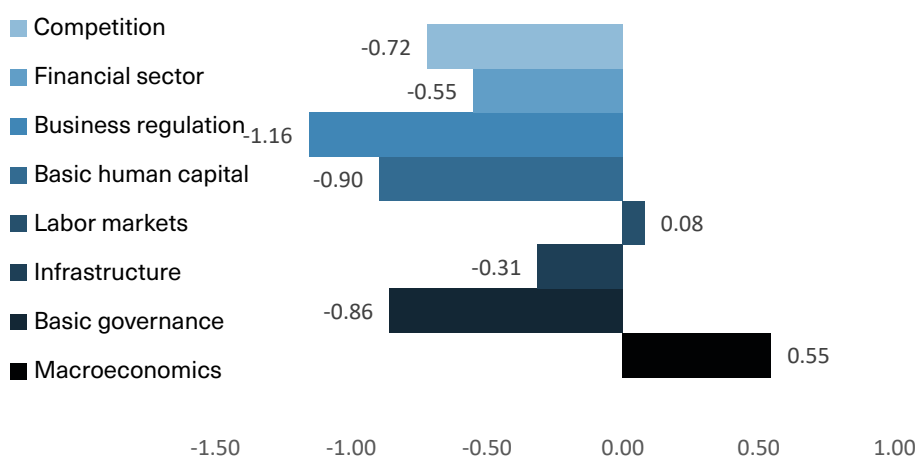
Aspek lain yang memiliki simpangan positif cukup besar dibanding rata-rata nasional adalah *basic human capital*. IPM Bali terus mengalami kenaikan setiap tahunnya, dari 70,10 pada tahun 2010 meningkat menjadi 76,44 pada tahun 2022. Pada level kabupaten/kota, sebagian besar nilai IPM berada pada level tinggi. Dari 9 kabupaten/kota di Bali, 2 daerah berada pada level sangat tinggi, 6 daerah pada level tinggi, dan 1 daerah pada level sedang.



Pada Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagian besar aspek memiliki *z-score* yang lebih rendah dari rata-rata nasional, meskipun pada mayoritas aspek simpangan negatifnya rendah, yaitu berkisar -0,03 sampai -0,2. Sementara untuk aspek *macroeconomics*, simpangan negatifnya cukup besar yaitu -0,44. Pada Desember 2022, inflasi gabungan 2 kota di NTB, yaitu Kota Mataram dan Kota Bima sebesar 6,23 persen, angka inflasi ini lebih tinggi dibanding angka inflasi nasional sebesar 5,51 persen. Kenaikan inflasi di NTB ini terutama dipengaruhi oleh kelompok Transportasi serta kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau

NTB memiliki potensi sektor pariwisata yang cukup kuat, dan sektor ini diklaim sebagai salah satu sektor yang paling cepat pulih pasca pandemi Covid-19. Hal ini terbukti dari ekonomi di NTB pada triwulan IV 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 7,04%. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan signifikan terjadi pada lapangan usaha akomodasi dan makan minum, yang didorong dari kenaikan jumlah tamu menginap di hotel dan kenaikan tingkat hunian kamar. Dengan semakin bangkitnya pariwisata di NTB, lapangan kerja akan semakin luas, dan ini tercermin dari nilai *z-score* aspek labor markets yang lebih besar dari rata-rata nasional.

Provinsi Nusa Tenggara Timur



Jika Provinsi Bali adalah wilayah yang memiliki kinerja terbaik di region Bali dan Nusa Tenggara, maka sebaliknya Provinsi NTT memiliki kinerja yang paling rendah. Sebagian besar aspek reformasi struktural memiliki nilai lebih rendah dari rata-rata nasional, dengan simpangan yang cukup jauh, di mana yang tertinggi adalah aspek *business regulation* sebesar -1,16. Pada tahun 2022, Ombudsman NTT melaporkan bahwa 3 PTSP kabupaten/kota memiliki nilai kategori pelayanan publik yang buruk sedangkan 13 PTSP lainnya juga masih berada pada rentang 54,00-77,99. Hal ini berarti, lebih dari separuh pemerintah daerah di NTT (16 dari total 23 pemerintah daerah atau sekitar 69,6%) memiliki kinerja pelayanan yang belum ideal. Kondisi ini patut menjadi perhatian, mengingat PTSP berpengaruh pada potensi masuknya investasi di NTT. Apabila layanan yang diberikan PTSP tidak memenuhi standar maka akan mengakibatkan kesulitan dalam proses perizinan usaha, sehingga minat investor untuk melakukan investasi menjadi turun. Hal ini jelas akan berdampak pada penurunan potensi pendapatan daerah dan terbatasnya lapangan pekerjaan.





Aspek lain di NTT yang rata-ratanya jauh lebih rendah dari rata-rata nasional adalah basic human capital (-0,9), yang direpresentasikan oleh IPM. IPM merupakan indikator yang dapat mengukur keberhasilan daerah dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, yaitu khususnya dalam dimensi pendidikan dan kesehatan. Rendahnya IPM di sebagian besar kabupaten/kota di NTT menggambarkan masih rendahnya mutu pendidikan dan kesehatan di NTT. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dari 22 kabupaten/kota di NTT, Kota Kupang yang merupakan ibukota Prov. NTT adalah satu-satunya daerah yang nilai IPM-nya pada Tahun 2022 berada pada kategori sangat tinggi (80,2), sementara 21 daerah lainnya memiliki nilai lebih rendah dari 70. Fakta ini menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan di NTT, terutama pada kualitas pendidikan dan kesehatan.

Aspek lain yang *z-score*-nya lebih rendah dari rata-rata nasional adalah infrastructure, sebesar -0,86. NTT terdiri dari sejumlah pulau kecil dan terpencil di Indonesia, sehingga akses ke wilayah ini menjadi sulit. Terlebih, kurangnya konektivitas antar pulau di NTT juga dapat mempersulit mobilitas sumber daya yang diperlukan untuk pembangunan. Mengingat bahwa infrastruktur adalah salah satu kunci dalam peningkatan produktivitas perekonomian, peningkatan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat, maka seyogyanya pembangunan infrastruktur di NTT perlu menjadi perhatian.



KINERJA PELAYANAN PUBLIK

INDEKS INFRASTRUKTUR



Infrastruktur termasuk dalam salah satu misi perwujudan visi pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 s.d 2025. Sebagian penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa diarahkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah. Kebijakan *mandatory spending* terkait penggunaan Dana Transfer Umum dimulai pada tahun 2017 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016, yaitu sekurang-kurangnya 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. Selain itu, dalam kelompok Dana Transfer Khusus, diatur juga kebijakan penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) baik reguler, afirmasi, maupun penugasan, untuk pembangunan infrastruktur, di antaranya pembangunan jalan, air minum, dan sanitasi.

Melihat urgensi pemantauan kinerja infrastruktur di daerah, membuat DJPK berinisiatif untuk menyusun sebuah indeks infrastruktur yang diharapkan mampu memberikan gambaran kinerja infrastruktur di daerah. Indeks infrastruktur yang telah disusun ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan khususnya pelayanan publik bidang infrastruktur yang telah diimplementasikan. Selanjutnya, hasil evaluasi diharapkan berimbang pada peningkatan dan pemerataan kinerja serta perbaikan kualitas infrastruktur di seluruh Indonesia.

Penyusunan Indeks Infrastruktur yang disusun mengakomodasi beberapa variabel seperti Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Air Minum Layak, Persentase Keluarga dengan Akses terhadap Sanitasi Layak, Kondisi Jalan Mantap, Rasio Elektrifikasi, dan Kualitas Sinyal Telepon dan Sinyal Internet sehingga diperoleh gambaran kondisi infrastruktur di daerah yang lebih komprehensif terhadap capaian layanan infrastruktur.

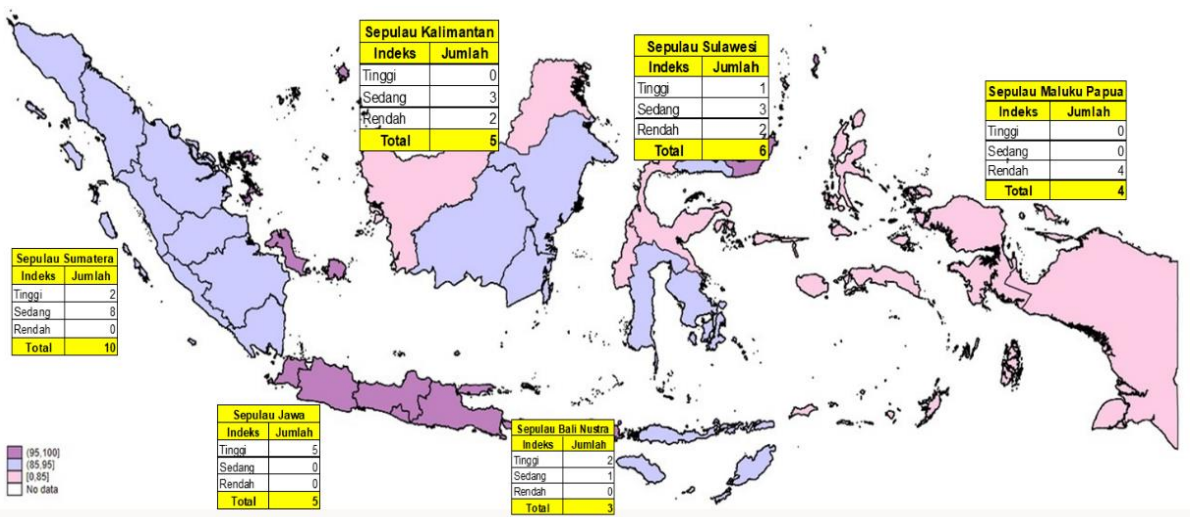


Indeks infrastruktur bernilai 1-100, di mana nilai 100 merupakan daerah dengan kondisi terbaik dibandingkan dengan daerah lainnya. Semakin tinggi nilai indeks infrastruktur suatu daerah maka semakin baik kualitas pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut. Rata-rata indeks infrastruktur pada level provinsi adalah 89,77, pada level kabupaten adalah 81,01, dan pada level kota adalah 93,89. Nilai indeks infrastruktur tertinggi pada provinsi dan kabupaten adalah sebesar 100 yang terdapat pada Provinsi Bali dan Kabupaten Badung. Sedangkan untuk kota, nilai indeks tertinggi sebesar 99,53 di Kota Depok. Sedangkan Provinsi Papua dan sebagian kabupaten di wilayah Papua merupakan daerah dengan indeks infrastruktur terendah.

1. Indeks Infrastruktur Provinsi

Secara umum, perhitungan indeks infrastruktur provinsi menunjukkan hasil yang cukup baik. Sebaran indeks infrastruktur provinsi dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1 - Peta Indeks Infrastruktur Provinsi Tahun 2021



Sumber: Hasil olah data Perhitungan Indeks Infrastruktur 2021

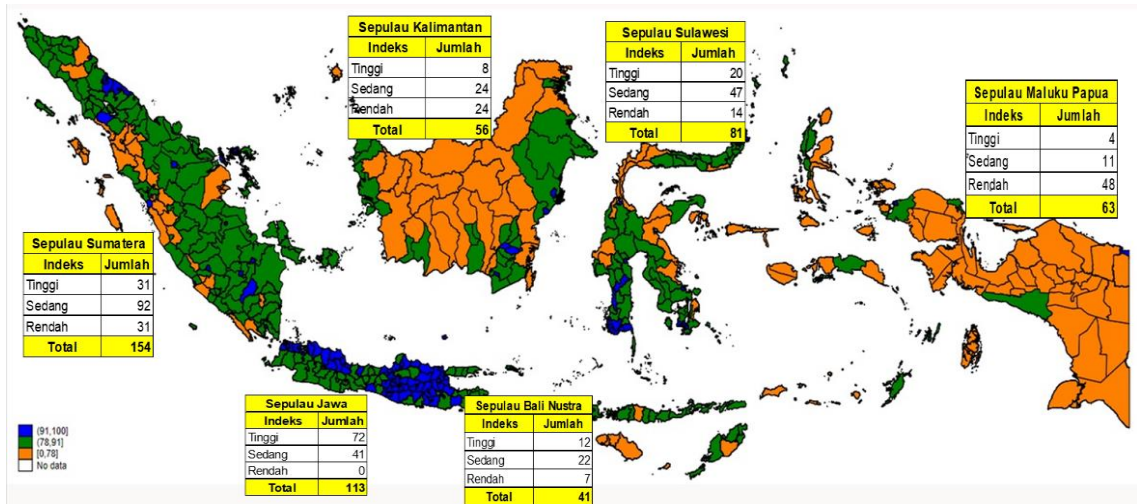
Provinsi dengan indeks infrastruktur tinggi (nilai indeks 95 s.d. 100) berada di Indonesia bagian barat mencakup seluruh provinsi di pulau Jawa, sebagian kecil provinsi di pulau Sumatera, provinsi Bali dan provinsi Nusa Tenggara Barat. Sementara untuk provinsi dengan indeks infrastruktur bernilai sedang (nilai indeks 85 s.d. 95) tersebar di Indonesia bagian barat dengan tengah, seperti sebagian besar provinsi di pulau Sumatera, sebagian besar provinsi di provinsi Kalimantan, dan sebagian besar provinsi di pulau Sulawesi. Untuk provinsi dengan indeks infrastruktur rendah (nilai indeks 0 s.d. 85), meliputi wilayah sebagian kecil provinsi di pulau Kalimantan, sebagian kecil provinsi di pulau Sulawesi, provinsi Nusa Tenggara Timur, dan provinsi di wilayah Indonesia Bagian Timur (Maluku dan Papua).



2. Indeks Infrastruktur Kab/Kota

Secara umum, sama seperti provinsi, perhitungan indeks infrastruktur kabupaten dan kota menunjukkan hasil yang cukup baik. Sebaran indeks infrastruktur kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2 - Peta Indeks Infrastruktur Kabupaten Kota Tahun 2021



Sumber: Hasil olah data Perhitungan Indeks Infrastruktur 2021

Kabupaten dan Kota dengan indeks infrastruktur tinggi (nilai indeks 91 s.d. 100) tersebar di Pulau Jawa dan Bali, di antaranya sebagian Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur. Sementara untuk kabupaten dan kota dengan indeks infrastruktur bernilai sedang (nilai indeks 78 s.d. 91) terdapat di sebagian besar wilayah pulau Sumatera, sebagian kecil pulau Kalimantan, dan sebagian besar pulau Sulawesi. Untuk kabupaten dan kota dengan indeks infrastruktur rendah (nilai indeks 0 s.d. 78) meliputi kabupaten kota di sebagian besar pulau Kalimantan, Maluku, dan Papua.

3. Indeks Tertinggi dan Indeks Terendah

Daerah dengan Indeks Infrastruktur tertinggi tahun 2021 berdasarkan level provinsi, kabupaten, dan kota dapat dilihat pada tabel 1 s.d 4.

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa terdapat 2 daerah dengan nilai indeks infrastruktur sempurna 100 yaitu Provinsi Bali dan Kabupaten Badung. Untuk wilayah kabupaten indeks tertinggi didominasi oleh wilayah Jawa.

Daerah dengan Indeks Infrastruktur terendah tahun 2021 berdasarkan level provinsi, kabupaten, dan kota dapat dilihat pada tabel 5. Berdasarkan data di atas terlihat bahwa nilai indeks infrastruktur terendah ada pada level kabupaten dan 5 daerah dengan indeks infrastruktur terendah tersebut berasal dari Provinsi Papua.



Tabel 1 - Pemerintah Daerah dengan Indeks Infrastruktur Tertinggi Tahun 2021

10 Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Nilai Indeks Tertinggi								
No	Nama Provinsi	Nilai Indeks	No	Nama Kabupaten	Nilai Indeks	No	Nama Kota	Nilai Indeks
1	Provinsi Bali	100	1	Kab. Badung	100.00	1	Kota Depok	99.53
2	Provinsi DI Yogyakarta	98.99	2	Kab. Sidoarjo	97.76	2	Kota Banda Aceh	99.53
3	Provinsi Banten	98.90	3	Kab. Sleman	97.61	3	Kota Madiun	99.43
4	Provinsi Jawa Timur	98.48	4	Kab. Jombang	97.56	4	Kota Bekasi	99.38
5	Provinsi Jawa Tengah	98.30	5	Kab. Kudus	97.36	5	Kota Blitar	98.77
6	Provinsi Bangka Belitung	97.24	6	Kab. Klungkung	97.14	6	Kota Surabaya	98.76
7	Provinsi Kepulauan Riau	95.88	7	Kab. Klaten	97.04	7	Kota Salatiga	98.71
8	Provinsi Sulawesi Utara	95.33	8	Kab. Semarang	96.63	8	Kota Tangerang	98.51
9	Provinsi Jawa Barat	95.24	9	Kab. Sukoharjo	96.62	9	Kota Mojokerto	98.50
10	Provinsi Nusa Tenggara Barat	95.11	10	Kab. Wonogiri	96.41	10	Kota Tangerang Selatan	97.92

Tabel 2 - Pemerintah Daerah dengan Indeks Infrastruktur Terendah Tahun 2021

10 Provinsi/Kabupaten/Kota dengan Nilai Indeks Terendah								
No	Nama Provinsi	Nilai Indeks	No	Nama Kabupaten	Nilai Indeks	No	Nama Kota	Nilai Indeks
1	Provinsi Papua	57.83	1	Kab. Nduga	21.96	1	Kota Padang Sidempuan	75.00
2	Provinsi Kalimantan Utara	79.64	2	Kab. Intan Jaya	29.35	2	Kota Gunungsitoli	76.99
3	Provinsi Maluku Utara	79.83	3	Kab. Lanny Jaya	33.09	3	Kota Sibolga	80.61
4	Provinsi Sulawesi Barat	80.81	4	Kab. Puncak Jaya	36.29	4	Kota Subulussalam	81.22
5	Provinsi Papua Barat	81.53	5	Kab. Mamberamo Tengah	36.69	5	Kota Tual	81.43
6	Provinsi Maluku	82.68	6	Kab. Yahukimo	40.90	6	Kota Sukabumi	83.67
7	Provinsi Kalimantan Barat	82.97	7	Kab. Yalimo	41.49	7	Kota Pagar Alam	83.68
8	Provinsi Sulawesi Tengah	83.05	8	Kab. Puncak	41.54	8	Kota Sungai Penuh	86.22
9	Provinsi Kalimantan Tengah	85.18	9	Kab. Tolikara	42.61	9	Kota Tidore Kepulauan	86.46
10	Provinsi Nusa Tenggara Timur	86.19	10	Kab. Asmat	43.21	10	Kota Tasikmalaya	86.84

Tabel 3 - Pemerintah Daerah dengan Indeks Infrastruktur Tertinggi di Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2021

Provinsi		Kabupaten		Kota				
No.	Pemda	Indeks	No.	Pemda	Indeks	No.	Pemda	Indeks
1	Provinsi Bali	100.00	1	Kab. Badung	100.00	1	Kota Denpasar	96.80
2	Provinsi Nusa Tenggara Barat	95.11	2	Kab. Klungkung	97.14	2	Kota Mataram	96.89
3	Provinsi Nusa Tenggara Timur	86.19	3	Kab. Tabanan	96.21	3	Kota Bima	93.26
4			4	Kab. Gianyar	95.88	4	Kota Kupang	95.12
5			5	Kab. Buleleng	95.17	5		

Tabel 4 - Daerah Kabupaten dengan Indeks Infrastruktur Terendah di Bali dan Nusa Tenggara Tahun 2021

Kabupaten		
No.	Pemda	Indeks
1	Kab. Sumba Tengah	61.85
2	Kab. Sumba Timur	68.64
3	Kab. Timor Tengah Selatan	69.18
4	Kab. Manggarai Timur	69.41
5	Kab. Sumba Barat Daya	73.66

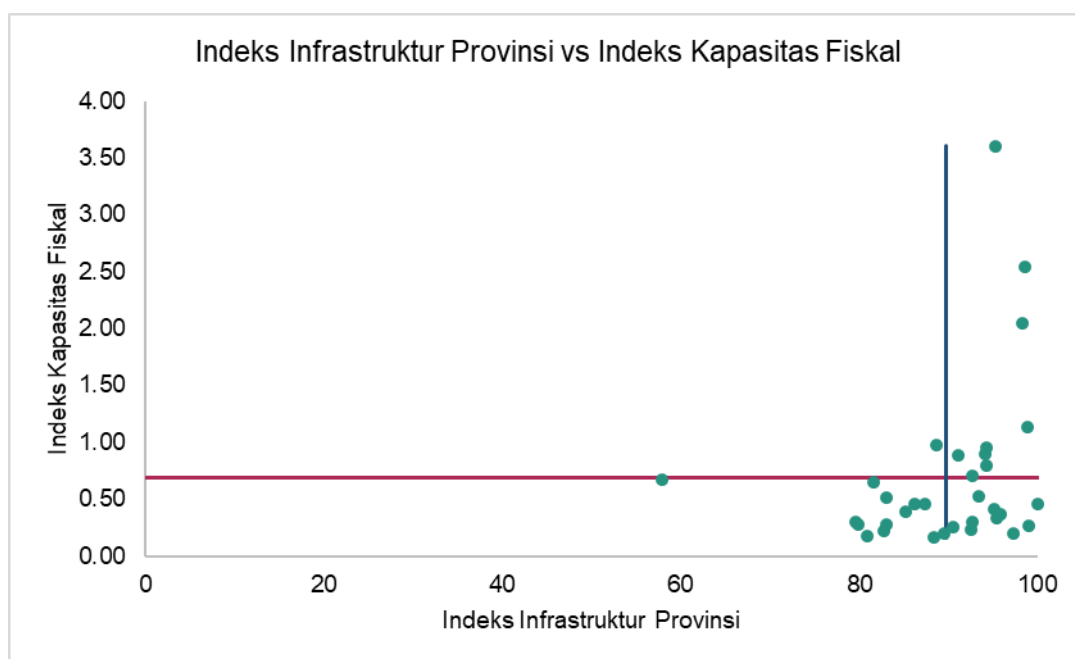


Pada level provinsi di regional Bali dan Nusa Tenggara, nilai indeks infrastruktur tertinggi dicapai oleh Provinsi Bali sebesar 100,00, sementara indeks terendah berada di provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 86,19. Pada level kabupaten/kota, nilai indeks infrastruktur tertinggi sebesar 96,80 didapat Kota Denpasar, sedangkan nilai indeks infrastruktur terendah adalah Kabupaten Sumba Tengah sebesar 61,85. Disparitas tertinggi dan terendah untuk level kabupaten/kota di regional Bali dan Nusa Tenggara lebih tinggi yaitu sebesar 38,15 dibanding untuk level provinsi yaitu sebesar 13,81. Hal ini menunjukkan ketimpangan kesehatan antar wilayah di level kabupaten/kota lebih tinggi dibandingkan antar wilayah di level provinsi di regional Bali dan Nusa Tenggara.

4. Hubungan Indeks Infrastruktur dan Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain yang sah. Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan adalah pendapatan yang bersumber dari transfer antara lain pajak rokok, dana bagi hasil cukai hasil tembakau, DAK Fisik, dan DAK Nonfisik. Sedangkan belanja tertentu yang diperhitungkan antara lain belanja pegawai, belanja bunga, dan belanja bagi hasil. Kapasitas Fiskal Daerah dikelompokkan dalam 5 kategori yaitu sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.

Gambar 3 - Kuadran Indeks Infrastruktur Provinsi dan Indeks Kapasitas Fiskal



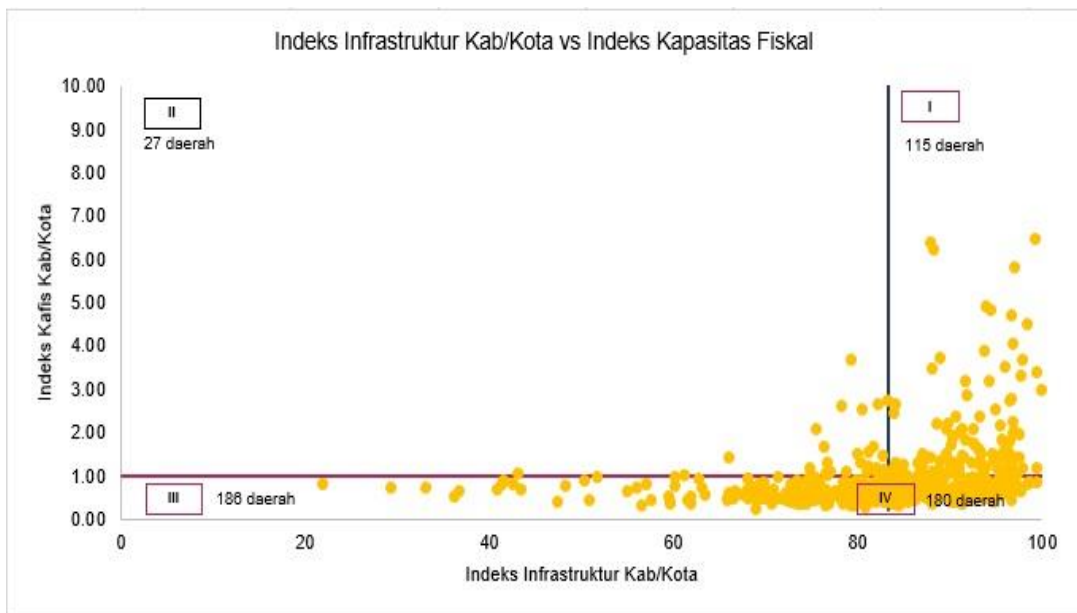
Sumber: Hasil olah data Perhitungan Indeks Infrastruktur 2021



Semakin tinggi kapasitas fiskal suatu daerah maka semakin besar kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat terutama dalam penyediaan pelayanan publik, termasuk pelayanan di bidang infrastruktur. Dengan kapasitas fiskal yang tinggi berarti suatu pemerintah daerah memiliki kemampuan keuangan yang memadai untuk melaksanakan belanja daerah sesuai prioritas masing-masing daerah. Dengan demikian, indeks infrastruktur seharusnya sejalan dengan kapasitas fiskal daerah. Untuk melihat korelasi antara indeks infrastruktur dan kapasitas fiskal daerah level provinsi dapat dilihat pada Gambar 3.

Sedangkan korelasi antara indeks infrastruktur dan kapasitas fiskal daerah level kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 4 - Kuadran Indeks Infrastruktur Kabupaten/Kota dan Indeks Kapasitas Fiskal



Sumber: Hasil olah data Perhitungan Indeks Infrastruktur 2021

Berdasarkan kuadran yang ditampilkan pada gambar di atas, maka terdapat 13 provinsi dan 186 kabupaten/kota yang terletak di kuadran III yang seharusnya mendapatkan prioritas alokasi DAK Fisik terkait infrastruktur relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain, begitu pun sebaliknya. Di samping itu, daerah, terutama yang terletak di kuadran III perlu didorong untuk dapat memenuhi *mandatory spending* bidang infrastruktur melalui penerapan *reward and punishment*. Daerah dengan indeks kapasitas tinggi dan indeks infrastruktur tinggi seyogianya mendapatkan alokasi yang lebih kecil. Untuk daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi, namun masih memiliki indeks infrastruktur rendah, perlu dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pada pemerintah tersebut, agar lebih mengalokasikan pendapatannya dan fokus kepada perbaikan dan peningkatan pembangunan infrastruktur.



Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kesimpulan

Merujuk pada hasil analisis pembahasan sebelumnya, ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Indeks infrastruktur daerah pada umumnya sudah cukup baik dan mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari rata-rata indeks infrastruktur level provinsi sebesar 89,77, pada level kabupaten adalah 81,01, dan pada level kota adalah 93,89.
2. Terdapat ketimpangan yang cukup tinggi jika dibandingkan angka indeks infrastruktur antardaerah. Pada level provinsi, daerah dengan indeks infrastruktur tertinggi yaitu Provinsi Bali sebesar 100, sedangkan indeks infrastruktur terendah yaitu Provinsi Papua sebesar 57,83. Sedangkan pada level kabupaten/kota ketimpangan lebih tinggi lagi karena daerah dengan indeks infrastruktur tertinggi yaitu Kabupaten Badung sebesar 100 sedangkan daerah dengan indeks infrastruktur terendah yaitu Kabupaten Nduga sebesar 21,96.
3. Kuadran indeks kapasitas fiskal daerah dan indeks infrastruktur menunjukkan hasil yang terbagi dalam 4 kelompok, antara lain:
 - a. indeks kapasitas fiskal tinggi dan indeks infrastruktur tinggi (Kuadran I);
 - b. indeks kapasitas fiskal tinggi dan indeks infrastruktur rendah (Kuadran II);
 - c. indeks kapasitas fiskal rendah dan indeks infrastruktur rendah (Kuadran III);
 - d. indeks kapasitas fiskal rendah dan indeks infrastruktur tinggi (Kuadran IV).

Untuk daerah provinsi, jumlah terbesar ada pada kuadran III (13 daerah), diikuti kuadran IV (10 daerah), kuadran I (9 daerah) dan kuadran II (1 daerah). Sementara versi kabupaten/kota, terdapat 186 daerah di kuadran III, 180 daerah di kuadran IV, 115 daerah di kuadran I, dan 27 daerah di kuadran II.

2. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan kesimpulan di atas, rekomendasi yang dapat diberikan bahwa data Indeks infrastruktur dapat digunakan untuk mengetahui pemetaan dan kualitas infrastruktur di daerah sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah untuk melihat keberhasilan kebijakan pengalokasian dana transfer di bidang infrastruktur.

Untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota yang terletak pada kuadran III, Pemerintah Pusat dapat membantu pendanaan guna meningkatkan nilai indeks dengan memprioritaskan alokasi DAK Fisik terkait infrastruktur relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain, begitu pun sebaliknya. Di samping itu, daerah-daerah tersebut perlu didorong untuk dapat memenuhi *mandatory spending* bidang infrastruktur melalui penerapan *reward and punishment*. Daerah dengan indeks kapasitas tinggi dan indeks infrastruktur tinggi seyogianya mendapatkan alokasi yang relatif lebih kecil. Untuk daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi, namun masih memiliki indeks infrastruktur rendah, perlu dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pada pemerintah tersebut agar lebih mengalokasikan pendapatannya dan fokus kepada perbaikan dan peningkatan pembangunan infrastruktur.



KAJIAN KHUSUS



“DAMPAK EL NINO TERHADAP PEREKONOMIAN DAN FISKAL DAERAH SERTA MITIGASI RISIKO YANG DIPERLUKAN”

Pendahuluan

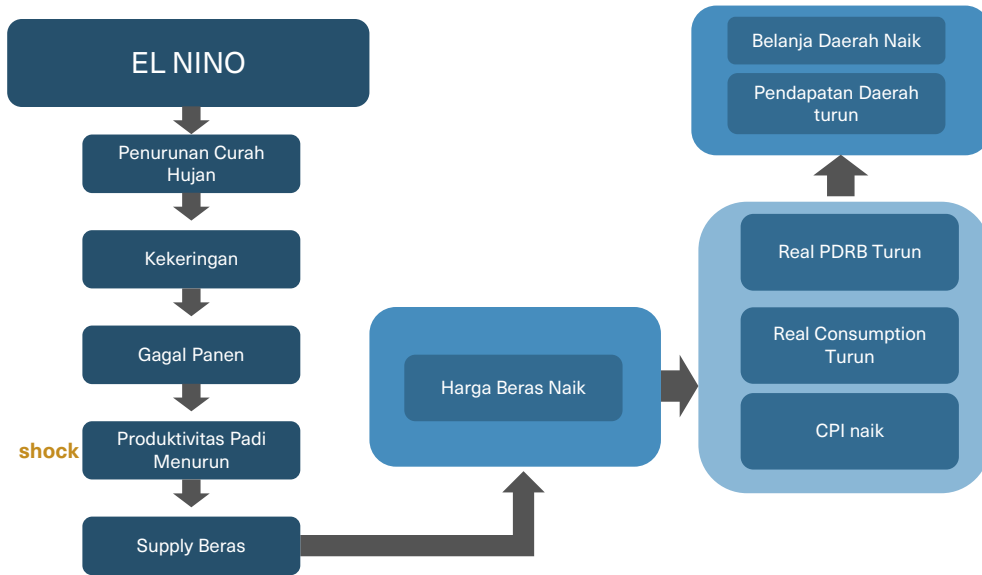
Salah satu bentuk potensi gangguan (*shock*) dalam perekonomian daerah yang berasal dari perubahan iklim (*climate change*) dan berdampak kepada fiskal daerah adalah penurunan produksi pertanian sebagai akibat musim kemarau ekstrem seperti El Nino. El Nino, sebuah fenomena alam yang terjadi secara periodik di Samudra Pasifik, dapat membawa perubahan signifikan dalam pola cuaca global. Salah satu dampaknya adalah peningkatan suhu permukaan air laut, yang dapat mempengaruhi pola hujan dan curah hujan di berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah yang bergantung pada produksi padi. Dalam konteks ini, kajian dampak El Nino terhadap produksi padi menjadi sangat relevan karena padi merupakan salah satu tanaman pangan utama di banyak negara terutama di Indonesia, dan fluktuasi produksinya dapat berdampak pada ketahanan pangan dan ekonomi daerah dan nasional.

El Nino tahun 2023 sendiri diprediksi mulai terjadi di bulan Juni 2023 dan puncaknya akan terjadi pada Agustus 2023 sampai dengan September 2023. Selanjutnya berdasarkan informasi BPS, diketahui bahwa terdapat penurunan produksi padi di bulan Agustus 2023 sebesar 4,01% (mtm). Berdasarkan hal tersebut dapat diestimasi potensi dampak El Nino terhadap fiskal *outcome* pemerintah daerah.

Metodologi dan Data

Untuk mengestimasi potensi risiko fiskal daerah yang berasal dari perubahan iklim, metode yang digunakan adalah analisis ekonomi secara *wide* (*economic wide modelling*) menggunakan model CGE (*Computable General Equilibrium*). Metode *Computable General Equilibrium* (CGE) adalah pendekatan analisis ekonomi yang digunakan untuk mengkaji dampak kebijakan ekonomi, perdagangan, dan perubahan dalam berbagai sektor perekonomian.

Transmisi Dampak El Nino (CGE)



Dengan keterbatasan yang ada, model CGE yang digunakan adalah model CGE Indoterm 39 sektor dengan 30 provinsi¹. Model CGE Indoterm merupakan model CGE dengan database IRIO (*Inter Regional Input Output*) yang diproduksi BPS sehingga shock dalam perekonomian dapat diterapkan pada region-region tertentu yang diinginkan.

Informasi yang ingin didapat dari model CGE adalah besaran penurunan real PDRB, *real household consumption*, dan kenaikan CPI akibat adanya shock dalam perekonomian berupa penurunan produksi padi. Informasi tersebut kemudian digunakan untuk menghitung potensi dampak fiskal berupa peningkatan belanja pemerintah daerah karena misalnya peningkatan anggaran belanja bantuan sosial sebagai akibat peningkatan jumlah penduduk miskin yang disebabkan oleh penurunan real PDRB, *real household consumption*, dan kenaikan harga barang atau CPI.

Data yang digunakan adalah publikasi BPS terkait produksi padi nasional yang turun sebesar 4,01% *month to month* Agustus 2023. Namun demikian, diasumsikan penurunan produksi tersebut terjadi sebagian besar pada wilayah DKI, Jabar, Banten, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT. Oleh karena itu, shock ekonomi berupa penurunan produksi padi (xtot) dilakukan dengan memberikan porsi yang sama pada daerah-daerah tersebut dalam model CGE.

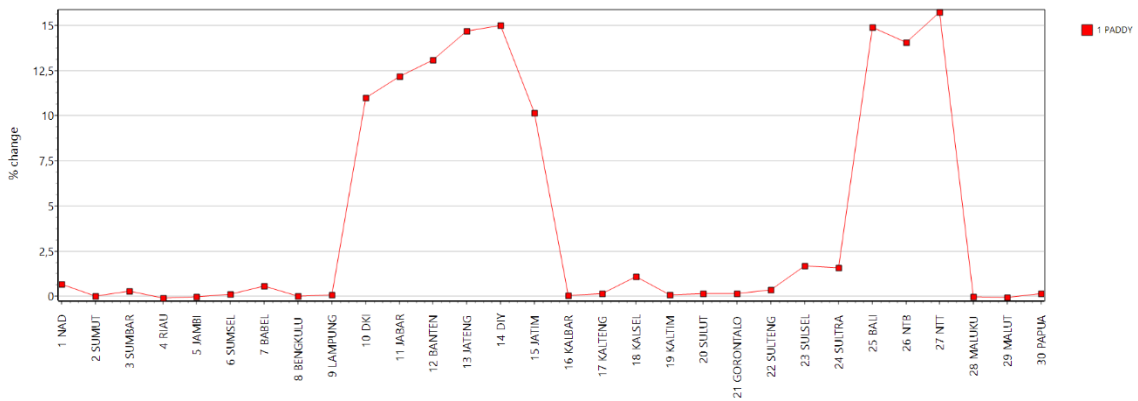
Hasil

Berdasarkan estimasi model CGE Indoterm didapat bahwa terjadi peningkatan harga padi utamanya di wilayah-wilayah yang mengalami penurunan produksi padi seperti DKI, Jabar, Banten, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT. Besaran peningkatan harga padi pada region-region di Indonesia dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut.

¹ Horridge, M., Wittwer, G. and Wibowo, K., 2006. Dampak dari kebijakan impor beras nasional terhadap perekonomian Jawa Barat: simulasi menggunakan model CGE Indoterm. *Sosiohumaniora*, 8(3), p.226.

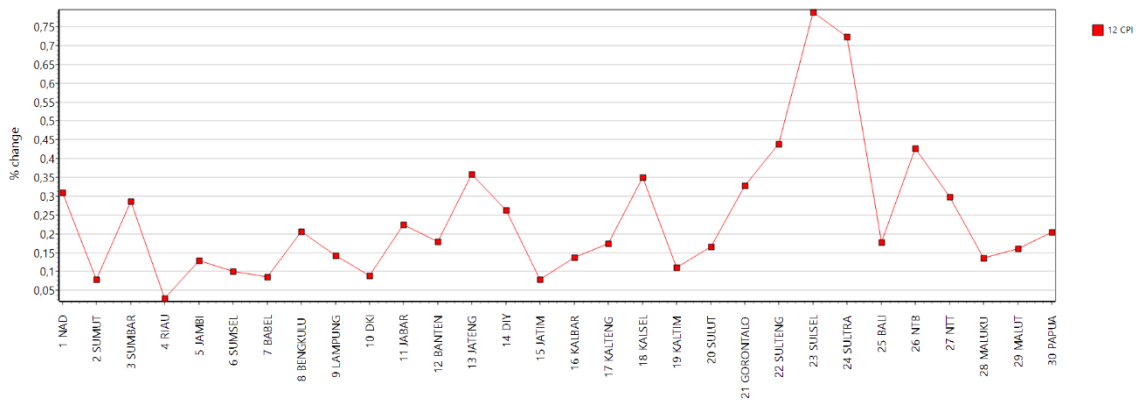


Persentase Perubahan Harga Padi Akibat Penurunan Produksi Padi

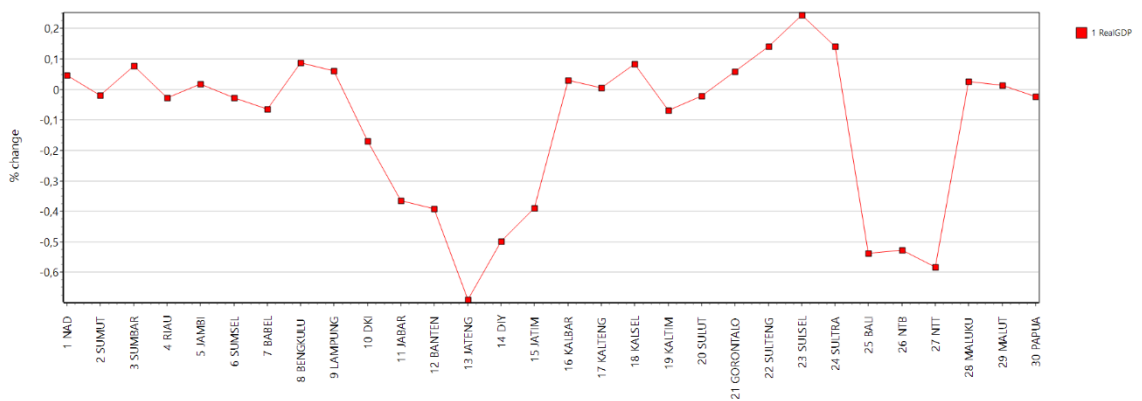


Lima daerah terbesar kenaikan harga padi adalah NTT, DIY, Bali, Jateng, dan NTB dengan besaran secara berurutan adalah 15,72%, 15%, 14,89%, 14,67%, dan 14,04%. Selain peningkatan harga padi terjadi pula peningkatan harga-harga barang (IHK) disejumlah region di Indonesia sebagai akibat penurunan produksi padi di 9 wilayah di Indonesia sebagaimana disebutkan di atas. Besaran peningkatan harga-harga barang pada sejumlah daerah di Indonesia dapat digambarkan melalui grafik sebagai berikut.

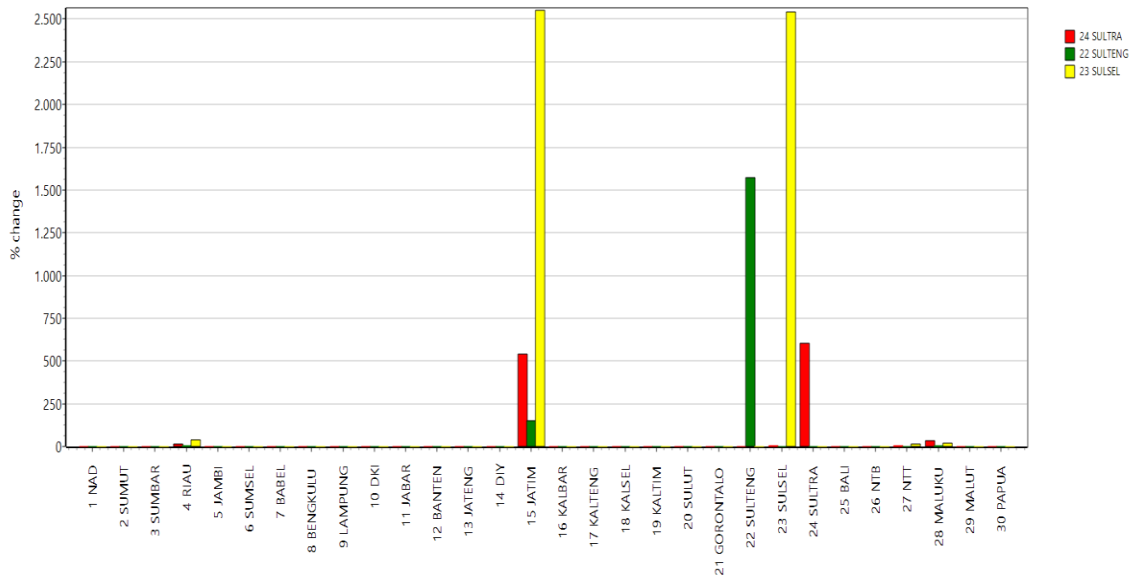
Persentase Perubahan CPI Akibat Penurunan Produksi Padi



Persentase Perubahan CPI Akibat Penurunan Produksi Padi



Perdagangan antara Sulsel, Sultra, dan Sulteng terhadap Jatim



Dapat dilihat pada grafik di atas bahwa terdapat kenaikan IHK tidak hanya pada daerah seperti DKI, Jabar, Banten, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT namun semua daerah mengalami kenaikan CPI. Namun daerah seperti Sulsel ternyata mengalami kenaikan yang paling tinggi. Hal ini dikarenakan daerah di Sulsel merupakan produsen padi, sehingga kenaikan harga di daerah DKI, Jabar, Banten, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT mendorong peningkatan pendapatan Sulsel dari ekspor beras terutama ke daerah Jatim. Selain itu penurunan produksi beras di daerah DKI, Jabar, Banten, Jateng, DIY, Jatim, Bali, NTB, NTT mendorong peningkatan permintaan (demand) beras di daerah Sulsel. Peningkatan demand ini dibarengi dengan peningkatan pendapatan riil atau riil PDRB yang pada akhirnya akan mendorong peningkatan harga-harga barang (CPI) di wilayah Sulsel. Hal ini juga berlaku bagi daerah seperti Sultra dan Sulteng. Namun demikian, kenaikan pendapatan riil terasa lebih dominan sebagai akibat adanya peningkatan penerimaan atas ekspor padi ke daerah-daerah yang mengalami penurunan produksi padi.

Selanjutnya daya beli masyarakat akan menurun yang dicerminkan dari konsumsi masyarakat yang menurun sebagai akibat penurunan riil PDRB kenaikan IHK. Hal ini memiliki konsekuensi kepada semakin bertambahnya masyarakat di bawah garis kemiskinan karena sebagaimana diketahui bahwa sektor penyumbang kemiskinan besar di Indonesia adalah sektor agrikultur. Studi menunjukkan bahwa penurunan 1% GDP akan mengurangi kemiskinan sekitar 1,7%² penduduk miskin begitu pula sebaliknya, sehingga perlu ada upaya preventif dan mitigatif pemerintah daerah untuk mengatasi hal ini. Terdapat dua kelompok masyarakat yang mungkin terdampak langsung dari hal ini, yang pertama masyarakat miskin yang sangat rentan dengan perubahan harga bahan pokok, kedua adalah buruh tani yang menggantungkan hidupnya pada hasil panen padi.

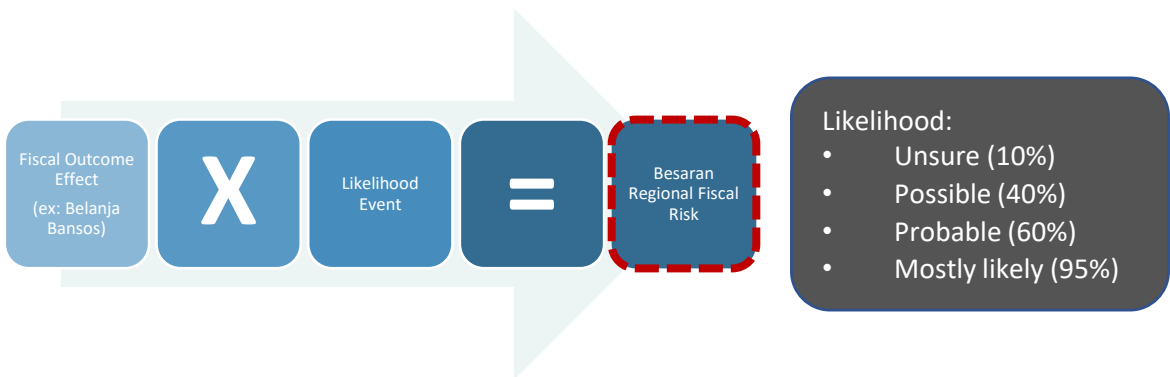
² Operationalising Pro-Poor Growth (OPPG) Programme (2005), 'Pro-Poor Growth in the 1990s: lessons and insights from 14 countries'.



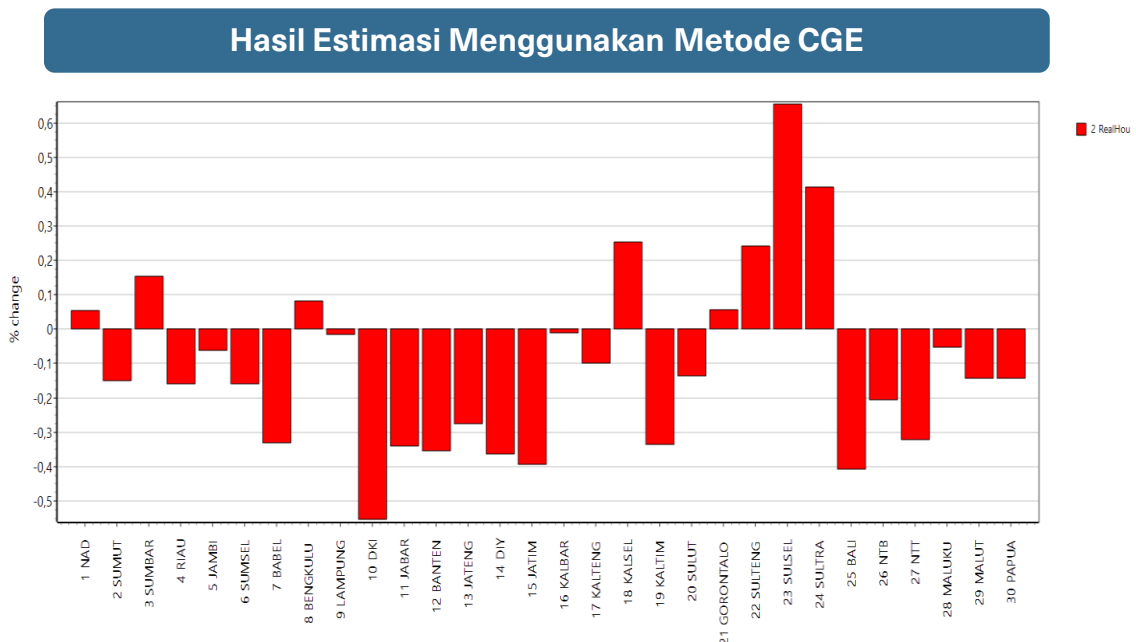
Risiko Fiskal Daerah akibat El Nino

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi khusus guna mencegah dan memitigasi dampak buruk El Nino seperti belanja bantuan sosial yang meningkat untuk mendukung buruh tani dan masyarakat miskin yang terdampak langsung. Besaran belanja sosial ini perlu dihitung secara cermat dengan mempertimbangkan karakteristik daerah masing-masing. Namun secara umum, pendekatan yang dapat dilakukan untuk menghitung potensi risiko fiskal daerah sebagai akibat peningkatan belanja bantuan sosial ataupun belanja tidak terduga adalah sebagai berikut.

Formula Perhitungan Besaran *Regional Fiscal Risk*



Perhitungan *Fiscal Outcome* seperti peningkatan belanja sosial adalah dengan cara mengalikan besaran penurunan konsumsi masyarakat rill (*rillhoushold consumption*) dengan porsi jumlah penduduk miskin di suatu daerah. Sebagai contoh, dari hasil estimasi model CGE di atas, diketahui bahwa wilayah Bali mengalami penurunan konsumsi masyarakat sebesar 0,4% dari *base line* atau turun sekitar Rp140 Miliar (asumsi PDRB Pengeluaran 2022) sebagaimana grafik berikut.



Konsumsi masyarakat yang turun tersebut tentunya berdampak pada penurunan konsumsi pada masyarakat miskin. Jika persentase penduduk miskin di wilayah Bali adalah 4,25% di tahun 2023, maka terdapat tambahan potensi penurunan konsumsi masyarakat miskin sebesar Rp 5,5 Milyar ($4,25\% \times 140$ Milyar). Jika pemerintah setempat telah menganggarkan belanja bantuan sosial bagi masyarakat miskin sebelumnya, maka potensi risiko berupa tambahan belanja bantuan sosial bagi masyarakat miskin perlu ditambah setidaknya sebesar Rp5,5 Milyar lagi guna menetralkan efek buruk EL Nino ini.

Langkah selanjutnya adalah menghitung kemungkinan adanya El Nino yang mempengaruhi produksi padi di suatu wilayah. Katakanlah dalam empat tahun terakhir setiap tahunnya terjadi El Nino di wilayah Bali yang mengganggu panen padi, sehingga kemungkinan di tahun depan juga akan terjadi. Jika hal dapat ditelusuri, maka probabilitas terjadi kembalinya El Nino yang berdampak pada penurunan produksi padi di Bali adalah pasti (most likely). Maka besaran risiko fiskal daerah adalah sebesar Rp5 Milyar yang dihitung dari potensi risiko fiskal berupa tambahan belanja tadi sebesar Rp5,5 Milyar dikalikan dengan probabilitas terjadinya misalkan 95%.

Selain dampak penurunan konsumsi, perlu juga dipertimbangkan dampak ekonomi sebagai akibat gagal panen padi. Hal ini karena, buruh tani telah menginvestasikan waktu dan modalnya untuk menggarap lahan padi sehingga terdapat potential loss atau loss sebagai akibat gagal panen padi yang disebabkan El Nino ini. Besarannya dapat dihitung dengan mengkalikan potensi penurunan PDRB dengan kemungkinan terjadinya El Nino yang berdampak pada penurunan produksi padi atau gagal panen padi. Misalkan tahun 2022, PDRB Wilayah Bali adalah sebesar Rp65,6 Triliun, dari estimasi model CGE di atas didapati bahwa terdapat potensi penurunan PDRB sebesar 0,53%, sehingga potensi penurunan ekonominya adalah sebesar Rp330,2 Milyar yang dihitung dari 0,53% dikalikan dengan Rp65,6 Triliun dikalikan dengan probabilitas terjadinya dampak buruk El Nino sebesar 95%.



Simpulan dan Rekomendasi

Dampak El Nino berupa kekeringan ekstrem yang melanda sejumlah daerah di Indonesia perlu diberikan atensi khusus guna memitigasi dampak buruk yang ditimbulkannya. Kekeringan ekstrem tadi menimbulkan sejumlah permasalahan seperti gagal panen padi yang pada akhirnya menurunkan produksi padi. Penurunan produksi padi nantinya akan meningkatkan harga padi dan kemudian harga beras. Hal ini terjadi lantaran permintaan tetap atau bahkan meningkat namun produksi padi justru menurun. Pemerintah daerah perlu mengidentifikasi potensi terjadinya El Nino di daerahnya kemudian mengestimasi dukungan anggaran yang diperlukan untuk memitigasi dampak buruk El Nino tersebut.

Dua kelompok masyarakat yang mungkin terdampak langsung dari hal ini, yang pertama masyarakat miskin yang sangat rentan dengan perubahan harga bahan pokok, dan kedua adalah buruh tani yang menggantungkan hidupnya pada hasil panen padi. Bagi masyarakat miskin yang rentan terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, pemerintah daerah perlu menyiapkan potensi tambahan belanja bantuan sosial yang menasar masyarakat yang rentan tersebut. Disisi lain, bagi buruh tani yang kehilangan modalnya untuk menanam padi kembali sebagai akibat gagal panen, perlu di-*support* dengan bantuan modal atau asuransi pertanian yang *meng-cover loss* akibat dampak El Nino. Selain itu kebijakan pemberian kredit lunak kepada petani juga dapat menjadi pertimbangan untuk meredam potensi *loss* para buruh tani yang disebabkan adanya gangguan gagal panen sebagai akibat adanya kekeringan ekstrem akibat El Nino.

Besaran anggaran yang perlu disiapkan pemerintah daerah untuk memitigasi dampak buruk El Nino terhadap perekonomian dan fiskal daerah dapat menggunakan pendekatan model CGE di atas. Proses kalibrasi tentunya perlu terus dilakukan setiap tahunnya oleh pemerintah daerah, apakah anggaran yang disarankan dalam model sudah tepat. Proses kalibrasi diperlukan untuk memastikan ketepatan penyediaan anggaran, kalibrasi dapat menentukan anggaran yang perlu disediakan apakah meliputi baik penurunan konsumsi dan penurunan dampak ekonomi, atau salah satunya saja. Dengan analisis ini, pemerintah daerah dalam hal ini pihak eksekutif memiliki *baseline* atau acuan yang dapat digunakan sebagai argumen kepada parlemen untuk *meng-earmark* tambahan anggaran belanja bantuan sosial bagi kelompok masyarakat yang rentan tersebut.

Salah satu hal yang juga penting adalah konsistensi lokasi prioritas dari DAK Ketahanan Pangan. Di tahun 2023 ini yang menjadi lokasi prioritas adalah lokasi yang memiliki indeks resilien iklimnya tinggi. Hal ini dimaksudkan agar lumbung padi atau tempat yang menjadi lokasi DAK Ketahanan pangan adalah lokasi yang iklimnya stabil sehingga *supply* atau produksi pangan diharapkan nantinya akan lebih stabil. Disisi lain, hal ini berarti lokasi prioritas saat ini tidak mempertimbangkan daerah-daerah yang menjadi lumbung padi yang kemungkinan akan mengalami gangguan iklim seperti El Nino sehingga dengan adanya gangguan tersebut potensi *supply* atau produksi padi menjadi menurun. Di tahun 2024, hal yang unik adalah bahwa lokasi prioritas untuk DAK ketahanan pangan adalah pada daerah yang memiliki indeks resilien iklim rendah yang mana ini berarti bahwa lokasi prioritas ini sudah mempertimbangkan potensi adanya gangguan iklim seperti El Nino yang mungkin menyebabkan produktivitas padi menurun. Dengan demikian, lokasi prioritas ini perlu menjadi perhatian agar efektivitas dari DAK Ketahanan pangan terhadap potensi gangguan El Nino ini dapat termitigasi dengan baik.



INOVASI DAERAH



“Buanglah sampah pada tempatnya”

Kalimat yang sangat sering kita dengar, bahkan dari sejak di bangku sekolah dasar. Kalimat tersebut terkadang kita baca di beberapa tempat umum, termasuk tempat pariwisata, hotel, restoran, mall, maupun taman bermain.

Namun demikian, permasalahan sampah ini sudah menjadi rahasia umum dan puncaknya terjadi sekitar tahun 2018 saat akan dilaksanakan kegiatan IMF- WB Annual Meetings di Bali yang menghadirkan sekitar 23.000 peserta, terdiri dari Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara, sektor swasta, organisasi non-pemerintahan, akademisi, serta media. Pada saat itu, beredar video yang menampilkan laut yang tercemar sampah di perairan Nusa Penida dan di sekitar Pantai Kuta dan menjadi salah satu sorotan dari tim media. Hal ini menjadi cambuk tersendiri bagi Pemerintah Pusat serta Pemerintah Daerah di Pulau Bali untuk dapat menangani permasalahan sampah, baik itu sampah yang bersumber dari plastik maupun yang bersumber dari rumah tangga.

Provinsi Bali merupakan Provinsi yang sangat bergantung pada sector pariwisata, jasa, dan perdagangan. Hal ini cukup beralasan mengingat pengunjung di Pulau Bali tidak hanya akan dimanjakan dengan objek wisata alamnya, namun pengunjung pun bisa menikmati berbagai macam objek wisata budaya dan tradisinya. Selain itu, keramahan penduduk Bali yang dapat menyambut dan menerima kedatangan para pengunjung untuk menikmati keindahan Bali menjadi nilai tambah tersendiri. Keramahan masyarakat ini sangat erat kaitannya dengan kepercayaan dan tradisi di Pulau Bali. Masyarakat Bali merupakan salah satu masyarakat yang memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi. Selain itu, hal ini juga berhubungan erat dengan penjagaan tradisi yang masih sangat kental untuk saling membantu satu sama lain dan saling menghormati. Hal di atas, sangat mendukung perkembangan pariwisata di Pulau Bali dan berefek positif terhadap kemajuan di berbagai bidang serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.



Di sisi lain, kemajuan tersebut juga telah menimbulkan berbagai masalah pembangunan dan perkembangan perkotaan yang tidak sedikit. Salah satunya yaitu timbulnya permasalahan lingkungan seperti terjadinya pencemaran dan meningkatnya volume sampah. Ditambah lagi dengan jumlah penduduk yang cukup besar serta pola konsumsi masyarakat di wilayah perkotaan yang cenderung konsumtif mengakibatkan tingginya volume sampah yang dihasilkan. Hal tersebut tentu mengindikasikan pentingnya upaya pengelolaan sampah di Pulau Bali.

Sampah dan isu lingkungan hidup memiliki hubungan yang erat dan kompleks. Sampah adalah salah satu aspek utama yang memengaruhi lingkungan, dan isu lingkungan hidup sering kali mencakup manajemen sampah sebagai salah satu komponennya. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan. Pembuangan sampah ilegal atau limbah berbahaya dapat merusak tanah, air, dan udara, serta dapat meracuni kehidupan laut dan tanaman. Selain itu, sampah yang tidak dikelola dengan baik juga dapat berdampak negatif pada kesehatan manusia termasuk penyebaran penyakit oleh vektor (seperti nyamuk yang berkembang biak di genangan air sampah) dan polusi udara akibat pembakaran sampah. Untuk itu, dalam upaya pelestarian lingkungan, diperlukan suatu system daur ulang sampah dan manajemen sampah yang bisa dalam bentuk pengurangan sampah



Di kota Denpasar sendiri, yang merupakan ibukota dari Provinsi Bali, jumlah sampah yang dikelola pada tahun 2021 adalah sebanyak 346.607,3 ton/tahun atau sebanyak 962,80 ton/hari dengan komposisi terbesar berasal dari TPS/Depo sebanyak 310,25 ton/hari dan berasal dari pengangkutan sebanyak 305,25 ton/hari³. Dengan jumlah sampah yang dikelola sebanyak itu, Pemkot Denpasar memerlukan suatu sistem dan metode yang dapat memenuhi kebutuhannya. Namun demikian, mengingat kapasitas fiskal Kota Denpasar yang terbatas di mana berdasarkan rasio kapasitas fiskal daerah, Kota Denpasar masuk dalam kategori sangat rendah⁴ sehingga memerlukan bantuan dari Pemerintah Pusat untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana pengolahan sampah tersebut. Kondisi sarana dan prasarana memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi dengan pariwisata. Kondisi saarna prasarana yang baik dapat meningkatkan daya tarik pariwisata suatu wilayah, sementara sektor pariwisata yang berkembang dengan baik juga dapat memacu perkembangan sarana dan prasarana.

³ Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar

⁴ PMK 193 Tahun 2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah





Gayung pun bersambut, Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR membangun tiga TPST sekaligus, yaitu TPST Kertalangu, TPST Padang Sambian, dan TPST Tahura Ngurah Rai yang diresmikan oleh Presiden Jokowi pada bulan Maret 2023. TPST ini merupakan tempat pengolahan sampah pertama dengan sistem yang tidak begitu rumit tetapi mampu mengolah sampah dengan optimal dan diharapkan bisa menjadi *role model* di kota dan kabupaten lain di seluruh tanah air. Disamping itu, sistem manajemen TPST Kota Denpasar sangat rapi dan bagus yang dapat menginspirasi kota dan kabupaten lain.

Dengan beroperasinya TPST ini, tidak hanya mengurangi kuantitas sampah dari sumbernya, tetapi juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pemilahan sampah dari sumber yang dilengkapi dengan bantuan tong sampah untuk setiap jenis sampah. Diharapkan kedepannya warga akan lebih peduli terhadap lingkungan dan mulai membiasakan diri dengan perubahan perilaku terhadap sampah. Selain itu, dengan beroperasinya TPST akan menambah jumlah lapangan kerja yang setidaknya memerlukan dukungan operator, tenaga angkut, sopir truk pengangkut sampah dll.

Dalam rangka pengelolaan sampah yang lebih optimal, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar melakukan “penjemputan” sampah berukuran besar seperti kasur rusak, bantal bekas, lemari rusak, kulkas rusak, dan sebagainya sehingga masyarakat tidak perlu membuang sampah besar tersebut dibuang oleh oknum warga di tempat terbuka, tanah kosong, tegalan, saluran drainase, sungai maupun di depan rumah. Dalam pelaksanaannya, warga cukup menghubungi DLHK Kota Denpasar melalui telepon, email atau media social untuk kemudian deregister oleh petugas yang memuat pengaturan jadwal penjemputan dan pengangkutan sampah. Selain itu, warga pun dapat langsung membawa sampah besarnya ke lokasi yang sudah ditetapkan yaitu Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kertalangu.





Namun demikian, pembangunan sarana dan prasarana yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat harus dijaga dan dirawat oleh Pemerintah Daerah sehingga PTSP tersebut dapat terus beroperasi dan berjalan sesuai dengan tujuan awal pembangunannya yaitu untuk pelestarian/perlindungan lingkungan di Pulau Bali serta sebagai upaya untuk meningkatkan layanan sanitasi di Kawasan pariwisata, dan bukan untuk menambah pendapatan asli daerah. Untuk itu, Pemerintah Kota Denpasar telah menyiapkan biaya operasional untuk TPST yang bersumber dari APBD Kota Denpasar berupa pembelian truk angkutan sampah, bahan bakar minyak, tenaga administrasi atau petugas admin, sopir, dan tenaga untuk mengangkut barang/sampah. Sinergi yang baik antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam proses pembangunan dan operasional dari PTSP di Kota Denpasar serta peran aktif dari masyarakat dapat menjadi *benchmark* dalam penanganan isu lingkungan atau untuk isu lainnya.

Albert Einstein pernah berkata "Lihatlah jauh ke alam, lalu kamu akan memahami segalanya lebih baik." Hal ini cukup beralasan karena bila kita mau belajar dari susunan alam semesta termasuk kondisi lingkungannya, niscaya kita akan memperlakukan setiap bagian dari bumi dan segala yang ada dibawah serta diatasnya dengan baik. Selain itu, dengan kondisi lingkungan yang sehat dan bersih, akan menjadi modal berharga bagi kita untuk melakukan sesuatu yang lebih besar dan lebih baik di kemudian hari.





**DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN**

Luky Alfirman • Mariatul Aini • Purwanto • Adriyanto • Bhimantara Widyajala • Agung Widiadi
Radies Kusprihanto Purbo • Britany Alasen Sembiring • Muhammad Hijrah • Rian Kelana
Ednur • Ananta Sugiyarto • Rossi Rizki Bestari • Adi Saputra • Efriyazwar • Amelia Imanda
Yusuf • Muhammad Harry Kurniawan • Magdalena Pohan • Deni Candra N. • Kharisma
Permata Karunianingtyas